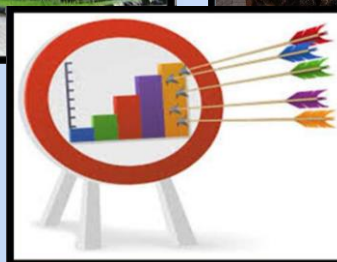




**BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

LAPORAN KINERJA

**Balai Diklat Keuangan Manado
Triwulan IV Tahun 2021**



EXECUTIVE SUMMARY

1. Pada bulan Januari tahun 2021, Kepala Balai Diklat Keuangan (BDK) Manado telah menandatangani Kontrak Kinerja Tahun 2021 yang berisi target kinerja yang harus dicapai hingga akhir tahun 2021. Sampai dengan akhir Triwulan IV, keseluruhan IKU dari total 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi target akhir tahun 2021.
2. Capaian IKU BDK Manado yang telah memenuhi target sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik dengan realisasi persentase sebesar 99,64% dari target 93%;
 - b. Indeks kepuasan pengguna layanan dengan realisasi indeks sebesar 4,63 dari target 4,41;
 - c. Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran dengan realisasi indeks sebesar 4.63 dari target 4.33;
 - d. Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti dengan realisasi 100% dari target 100%;
 - e. Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran dengan realisasi indeks sebesar 5 dari target 5;
 - f. Indeks persepsi integritas dengan realisasi indeks sebesar 91,06 dari target 90,10;
 - g. Persentase pelaksanaan kajian, knowledge capture, dan aktualisasi pembelajaran dengan realisasi persentase sebesar 120% dari target 100%;
 - h. Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP dengan realisasi persentase sebesar 100% dari target 85%;
 - i. Indeks efektivitas forum group discussion kebijakan Kementerian Keuangan dengan realisasi indeks sebesar 97,80 dari target 90,00;
 - j. Persentase implementasi inovasi dengan realisasi persentase sebesar 100% dari target 100%;
 - k. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran dengan realisasi persentase sebesar 97,70% dari target 95,50%
 - l. Persentase kualitas pengelolaan bmn dan pengadaan dengan realisasi persentase sebesar 117,78% dari target 100%;
 - m. Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik dengan realisasi

persentase sebesar 109,39% dari target 100%.

3. Anggaran yang diterima Balai Diklat Keuangan Manado di awal tahun berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-015.11.2.636799/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp 4.874.125.000. Dalam perkembangannya terjadi 12 kali revisi anggaran. Revisi terakhir yaitu pada tanggal 28 Desember 2021, anggaran Balai Diklat Keuangan Manado sampai dengan revisi ke 12 yaitu sebesar Rp 4.024.005.000. Sampai dengan 31 Desember 2021 (Triwulan IV Tahun 2021), Balai Diklat Keuangan Manado telah menyerap anggaran sebanyak Rp 3.502.321.817 atau sebesar 87,04% dari total anggaran.
4. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan SDM berjumlah Rp1.358.963.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp1.192.882.071 atau 87,78%. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan (pembelajaran digital) berjumlah Rp 338.963.000 yang direncanakan untuk membiayai 13 pelatihan, satu ujian sertifikasi dan open class yang diselenggarakan Balai Diklat Keuangan Manado.
5. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Umum berjumlah Rp1.529.370.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.390.526.483 atau 90,92%;
6. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana Internal berjumlah Rp 914.906.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 704.018.333 atau 76,95%;
7. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Prasarana Internal berjumlah Rp 219.506.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp213.693.430 atau 97,35%;
8. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal berjumlah Rp 1.260.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.201.500 atau 95,36%
9. Keluaran (output) dari KRO Layanan SDM sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 106,94%;
10. Keluaran (output) dari KRO Layanan Umum sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00%;
11. Keluaran (output) dari KRO Layanan Sarana Internal sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00%;
12. Keluaran (output) dari KRO Layanan Prasarana Internal sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00%;
13. Keluaran (output) dari KRO Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00%.

14. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021, Balai Diklat Keuangan Manado telah melaksanakan 13 pelatihan dan satu ujian sertifikasi yang telah berakhir dari rencana 13 pelatihan dan satu ujian sertifikasi. Realisasi keluaran (output) dari pelatihan (Pembelajaran Digital) yang telah dilaksanakan yaitu sejumlah 53.346 jamlator dari rencana 49.882 jamlator .



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Balai Diklat Keuangan Manado merupakan salah satu unit pelaksana teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Balai Diklat Keuangan Manado mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, penataran keuangan negara dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara.

Penyusunan Laporan Kinerja Periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2021 untuk memberikan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan dan selanjutnya diharapkan adanya saran-saran dalam rangka pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di Balai Diklat Keuangan Manado.

Untuk mengetahui sejauh mana pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Diklat Keuangan Manado periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, disusunlah Laporan Kinerja Triwulan IV Tahun Anggaran 2021. Laporan ini berisi tentang kegiatan yang telah dilaksanakan serta pencapaian kinerja Balai Diklat Keuangan Manado.

Demikian laporan ini kami susun semoga bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan penyusunan di masa mendatang.

Manado, 7 Januari 2022
Kepala Balai,



Ditandatangani secara elektronik
Cucu Pujasetia

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR DIAGRAM	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. STRUKTUR ORGANISASI.....	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA	4
A. KONTRAK KINERJA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO TAHUN 2021.....	4
B. KEGIATAN.....	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
A. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	14
B. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN.....	20
C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA.....	25
BAB IV PENUTUP	57
A. SIMPULAN.....	57
B. SARAN.....	60
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I

KONTRAK KINERJA KEPALA BDK MANADO TAHUN 2021

LAMPIRAN II

**REALISASI DIKLAT BDK MANADO SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN
2021**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	6
Tabel 2.2	Revisi I Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	7
Tabel 2.3	Revisi II Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	7
Tabel 2.4	Revisi III Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	8
Tabel 2.5	Revisi IV Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	9
Tabel 2.6	Revisi V Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	10
Tabel 2.7	Revisi VI Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	11
Tabel 2.8	Revisi VII Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado Tahun Anggaran 2021	11
Tabel 3.1	Realisasi Belanja Per Klasifikasi Rincian Output BDK Manado s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	14
Tabel 3.2	Realisasi Anggaran Per Rincian Output Layanan SDM s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	16
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran Pelatihan Per Subkomponen Layanan SDM s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	16
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Per Pelatihan s.d. Triwulan IV Tahun 2021...	17
Tabel 3.5	Realisasi Anggaran per Rincian Output Layanan Umum s.d. Triwulan IV Tahun 2021	19
Tabel 3.6	Realisasi Anggaran per Rincian Output Layanan Sarana Internal s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	19
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran per Rincian Output Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	20
Tabel 3.8	Rencana dan Realisasi Keluaran (Output) Kegiatan s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	21
Tabel 3.9	Rencana dan Realisasi Keluaran per Rincian Output Layanan SDM s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	21
Tabel 3.10	Realisasi Jamlator per Pelatihan s.d. Triwulan IV Tahun 2021...	22
Tabel 3.11	Rencana dan Realisasi Keluaran per Rincian Output Layanan Umum s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	23

Tabel 3.12	Rencana dan Realisasi Keluaran per Rincian Output Layanan Sarana Internal s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	24
Tabel 3.13	Rencana dan Realisasi Keluaran per Rincian Output Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	25
Tabel 3.14	Target dan Capaian IKU BDK Manado s.d. Triwulan IV Tahun 2021.....	25

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1	Realisasi Belanja Per Klasifikasi Rincian Output BDK Manado s.d. Triwulan IV Tahun 2021	15
Diagram 3.2	Penyerapan Anggaran Pelatihan s.d. Triwulan IV Tahun 2021..	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan aparatur negara yang profesional serta memahami tugas dan fungsinya, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif, stabil dan dinamis. Selain itu diperlukan instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggara negara dan pemerintahan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, pelaporan kinerja yang dikenal sebagai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diubah menjadi Laporan Kinerja. Setiap instansi pemerintahan diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi yang bersangkutan.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta reviu dan evaluasi kinerja.

Salah satu tahapan dalam penyelenggaraan SAKIP adalah pelaporan kinerja. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja antara lain:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Balai Diklat Keuangan Manado sebagai entitas akuntabilitas kinerja wajib menyusun Laporan Kinerja interim maupun tahunan. Selain untuk memenuhi kewajiban tersebut, Balai Diklat Keuangan Manado yang adalah unit pelaksana teknis di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maka laporan ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban formal kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan selama periode Januari sampai dengan Desember tahun 2021.

B. TUGAS DAN FUNGSI BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

Balai Diklat Keuangan Manado, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, merupakan unit pelaksana teknis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan penataran keuangan negara dengan wilayah kerja meliputi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Balai Diklat Keuangan Manado mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
2. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
3. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
4. Pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat;
5. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, dan pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Balai Diklat;
6. Pengembangan SDM Balai Diklat;
7. Pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
8. Pelaksanaan administrasi Balai Diklat.

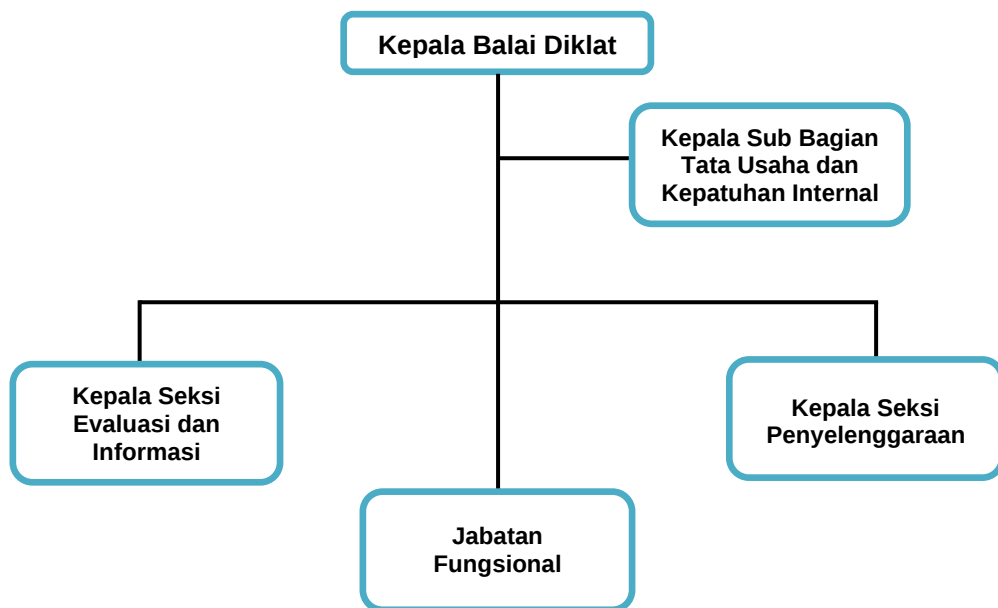
C. STRUKTUR ORGANISASI BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Manado saat ini terdiri atas:

1. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado
2. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal;
3. Kepala Seksi Penyelenggaraan
4. Kepala Seksi Evaluasi dan Informasi
5. Jabatan Fungsional

Dengan bagan organisasi sebagai berikut:

BAGAN ORGANISASI BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO

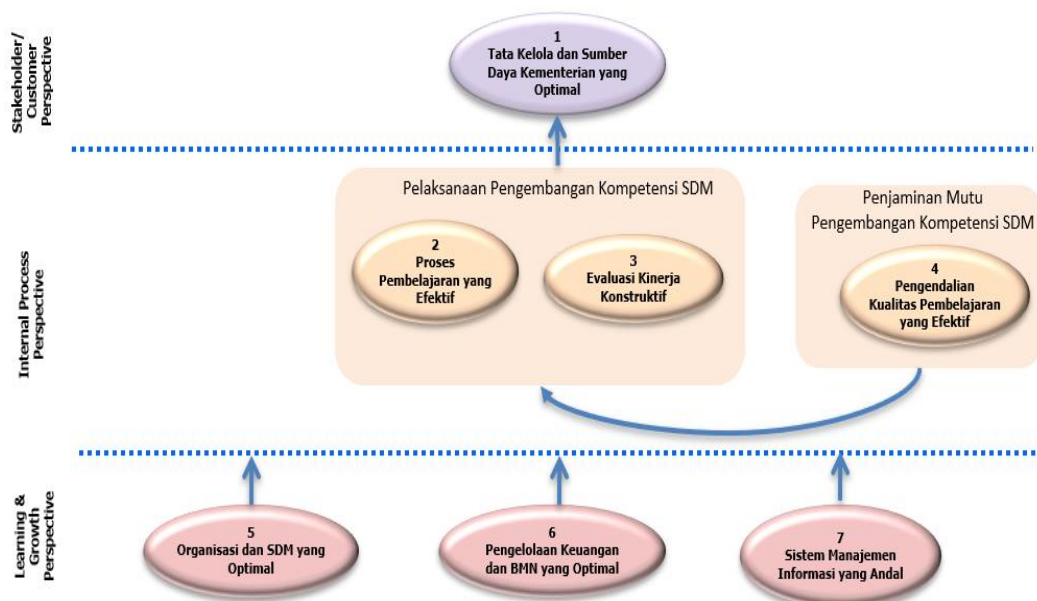


BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PENETAPAN KINERJA

Sebagai suatu entitas akuntabilitas kinerja, Balai Diklat Keuangan Manado memiliki visi untuk menjadi pengelola diklat terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan terbaik di daerah. Visi tersebut mengarahkan seluruh komponen Balai Diklat Keuangan Manado agar memiliki gambaran/cita-cita yang sama dalam pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengkoordinasian pekerjaan-pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan. Agar visi tersebut dapat diwujudkan, maka dirumuskan sasaran-sasaran strategis sebagai suatu prioritas yang ingin dimiliki, dijalankan dan dicapai organisasi. Untuk memastikan bahwa sasaran strategis tersebut dapat dicapai, maka perlu dilakukan manajemen atas resiko kegagalan pencapaian sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis tersebut diukur oleh indikator kinerja utama (IKU). Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai target IKU, dapat dilaksanakan kegiatan terobosan yang disebut Inisiatif Strategis (IS).

A. KONTRAK KINERJA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO TAHUN 2021

1. Peta Strategi BDK Manado Tahun 2021



2. Kontrak Kinerja Kepala BDK Manado Tahun 2021

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal	1a-CP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
		1b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41 (skala 5)
2.	Proses pembelajaran yang efektif	2a-N	Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran	4,33 (skala 5)
3.	Evaluasi kinerja konstruktif	3a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti	100%
4.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif	4a-CP	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	5 (skala 5)
5.	Organisasi dan SDM yang optimal	5a-CP	Indeks Integritas	90,10 (skala 100)
		5b-N	Persentase pelaksanaan kajian, <i>knowledge capture</i> , dan aktualisasi pembelajaran	100%
		5c-N	Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%
		5d-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)
		5e-N	Persentase implementasi inovasi	100%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	6a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		6b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%
7.	Sistem manajemen informasi yang andal	7a-N	Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%

Program

Program Dukungan Manajemen - Balai Diklat Keuangan
Manado Rp 4.024.005.000,00

Anggaran

Kegiatan

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum - Balai Diklat
Keuangan Manado Rp 1.358.963.000,00

Pengelolaan Organisasi dan SDM - Balai Diklat Keuangan
Manado Rp 2.665.042.000,00

Anggaran

B. KEGIATAN

Untuk tahun anggaran 2021 Balai Diklat Keuangan Manado memperoleh DIPA sebesar Rp 4.024.005.000,00, yang digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang ada.

Rencana Kegiatan Pelatihan yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keuangan Manado selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, dan 2.8.

Tabel 2.1
Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Penyuluh Perpajakan	11-Jan	15-Jan	5	30	Pajak
2	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	7-Jun	33	33	Pajak
3	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	20-Sep	24-Sep	5	25	KU
4	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	01-Oct	5	33	Pajak
5	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan I	06-Oct	15-Oct	10	58	Pajak
6	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa	11-Oct	14-Oct	4	30	KNPK
7	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan II	20-Oct	29-Oct	10	58	Pajak
8	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	25-Oct	28-Oct	4	30	KNPK
9	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Desa	01-Nov	03-Nov	3	30	KNPK
10	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa	08-Nov	11-Nov	4	30	KNPK

Tabel 2.2
Revisi I Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	01-Feb	09-Feb	22	30	Pajak
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	15-Feb	23-Feb	23	30	Pajak
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	7-Jun	23	33	Pajak
4	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	20-Sep	24-Sep	5	25	KU
5	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	01-Oct	10	33	Pajak
6	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan I	06-Oct	15-Oct	2	58	Pajak
7	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa	11-Oct	14-Oct	5	30	KNPK
8	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan II	20-Oct	29-Oct	10	58	Pajak
9	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	25-Oct	28-Oct	5	30	KNPK
10	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Desa	01-Nov	03-Nov	3	30	KNPK
11	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa	08-Nov	11-Nov	5	30	KNPK

Tabel 2.3
Revisi II Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	01-Feb	09-Feb	7	30	Pajak
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	15-Feb	23-Feb	7	30	Pajak
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	7-Jun	33	33	Pajak

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusediklat
		Mulai	Selesai			
4	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	20-Sep	24-Sep	5	25	KU
5	Lokakarya Teknik dan Metode Pencarian Untuk Menemukan Bukti Permulaan	21-Sep	22-Sep	2	30	Pajak
6	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	01-Oct	5	33	Pajak
7	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan I	06-Oct	15-Oct	10	58	Pajak
8	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa	11-Oct	14-Oct	4	30	KNPK
9	Pelatihan Teknis Orientasi untuk Pegawai Pajak Angkatan II	20-Oct	29-Oct	10	58	Pajak
10	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	25-Oct	28-Oct	4	30	KNPK
11	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Desa	01-Nov	03-Nov	3	30	KNPK
12	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa	08-Nov	11-Nov	4	30	KNPK

Tabel 2.4
Revisi III Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusediklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	01-Feb	09-Feb	7	30	Pajak
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	15-Feb	23-Feb	7	30	Pajak
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	7-Jun	33	33	Pajak
4	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	20-Sep	24-Sep	5	25	KU
5	Lokakarya Teknik dan Metode Pencarian Untuk Menemukan Bukti Permulaan	21-Sep	22-Sep	2	30	Pajak
6	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	01-Oct	5	33	Pajak

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
7	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa	11-Oct	14-Oct	4	30	KNPK
8	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	25-Oct	28-Oct	4	30	KNPK
9	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Desa	01-Nov	03-Nov	3	30	KNPK
10	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa	08-Nov	11-Nov	4	30	KNPK

Tabel 2.5
Revisi IV Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	01-Feb	09-Feb	7	30	Pajak
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	15-Feb	23-Feb	7	30	Pajak
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	7-Jun	33	33	Pajak
4	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	25-Mei	1-Oct	100	40	PSDM
5	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	19-Jul	20-Nov	100	40	PSDM
6	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	20-Sep	24-Sep	5	25	KU
7	Lokakarya Teknik dan Metode Pencarian Untuk Menemukan Bukti Permulaan	21-Sep	22-Sep	2	30	Pajak
8	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	01-Oct	5	33	Pajak
9	Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Desa	11-Oct	14-Oct	4	30	KNPK
10	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	25-Oct	28-Oct	4	30	KNPK
11	Pelatihan Penatausahaan Barang Milik Desa	01-Nov	03-Nov	3	30	KNPK
12	Pelatihan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan BUM Desa	08-Nov	11-Nov	4	30	KNPK

Tabel 2.6
Revisi V Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	01-Feb	09-Feb	7	30	Pajak
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	15-Feb	23-Feb	7	30	Pajak
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	7-Jun	33	33	Pajak
4	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	25-Mei	1-Oct	100	40	PSDM
5	Pelatihan Jarak Jauh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7-Jun	10-Jun	4	49	AP
6	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	17-Jun	17-Jun	1	49	LKPP
7	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	14-Jun	23-Jun	8	41	Pajak
8	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran	28-Jun	5-Jul	6	35	AP
9	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen SKPP	5-Jul	9-Jul	5	49	AP
10	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	19-Jul	20-Nov	100	40	PSDM
11	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	20-Sep	24-Sep	5	25	KU
12	Pelatihan Jarak Jauh Teknik dan Metode Pencarian Untuk Menemukan Bukti Permulaan	21-Sep	22-Sep	2	30	Pajak
13	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	01-Oct	5	33	Pajak

Tabel 2.7
Revisi VI Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	01-Feb	09-Feb	7	28	Pajak
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	15-Feb	23-Feb	7	30	Pajak
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	15-Jul	33	33	Pajak
4	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	25-Mei	1-Okt	100	40	PSDM
5	Pelatihan Jarak Jauh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7-Jun	10-Jun	4	35	AP
6	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	17-Jun	18-Jun	2	35	LKPP
7	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	14-Jun	23-Jun	8	41	Pajak
8	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran	28-Jun	5-Jul	6	35	AP
9	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen SKPP	5-Jul	9-Jul	5	49	AP
10	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	19-Jul	20-Nov	100	40	PSDM
11	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	15-Nov	35	33	Pajak
12	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	14-Okt	28-Okt	10	25	KU

Tabel 2.8
Revisi VII Rencana Kegiatan Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado
Tahun Anggaran 2021

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusklat
		Mulai	Selesai			
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	01-Feb	09-Feb	7	28	Pajak

No	Nama Diklat	Waktu Pelaksanaan		Lama Diklat (hari)	Peserta	Program Pusediklat
		Mulai	Selesai			
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	15-Feb	23-Feb	7	30	Pajak
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	12-Apr	27-Ags	33	33	Pajak
4	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	25-Mei	1-Okt	100	40	PSDM
5	Pelatihan Jarak Jauh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	7-Jun	10-Jun	4	35	AP
6	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	17-Jun	18-Jun	2	35	LKPP
7	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	14-Jun	23-Jun	8	41	Pajak
8	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran	28-Jun	5-Jul	6	35	AP
9	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen SKPP	5-Jul	9-Jul	5	49	AP
10	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	19-Jul	20-Nov	100	40	PSDM
11	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan I	2-Ags	13-Ags	9	30	Pajak
12	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan II	23-Ags	2-Sep	9	30	Pajak
13	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	27-Sep	15-Nov	35	33	Pajak
14	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	14-Okt	28-Okt	10	25	KU

Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang harus dipenuhi Balai Diklat Keuangan Manado pada tahun 2021 adalah sejumlah 5 KRO, yaitu:

a. Layanan SDM

Terdiri dari:

1. Gaji dan Tunjangan;
2. Pengembangan SDM;
3. Pembelajaran Digital;
4. Manajemen Pengetahuan.

b. Layanan Umum

Terdiri dari:

1. Operasionalisasi Kantor;
2. Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran;

- 3. Kerumahtanggaan.
- c. Layanan Sarana Internal
Terdiri dari:
 - 1. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - 2. Peralatan Fasilitas Perkantoran;
 - 3. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
- d. Layanan Prasarana Internal
Terdiri dari:
 - 1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
- e. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
Terdiri dari:
 - 1. Laporan Keuangan Unit;
 - 2. Laporan Kinerja Unit.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran yang diterima Balai Diklat Keuangan Manado di awal tahun berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-015.11.2.636799/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp 4.874.125.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum, Organisasi, dan SDM dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari Layanan SDM, Layanan Umum, Layanan Sarana Internal, Layanan Prasarana Internal, dan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal. Dalam perkembangannya terjadi 12 kali revisi anggaran. Revisi terakhir yang mengubah Pagu Anggaran yaitu revisi ke-9, sedangkan revisi ke-10 sampai dengan revisi ke-12 hanya terkait administrasi. Revisi terakhir yaitu revisi ke-12 dilakukan pada tanggal 28 Desember 2021, anggaran Balai Diklat Keuangan Manado sampai dengan revisi ke-12 yaitu sebesar Rp 4.024.005.000.

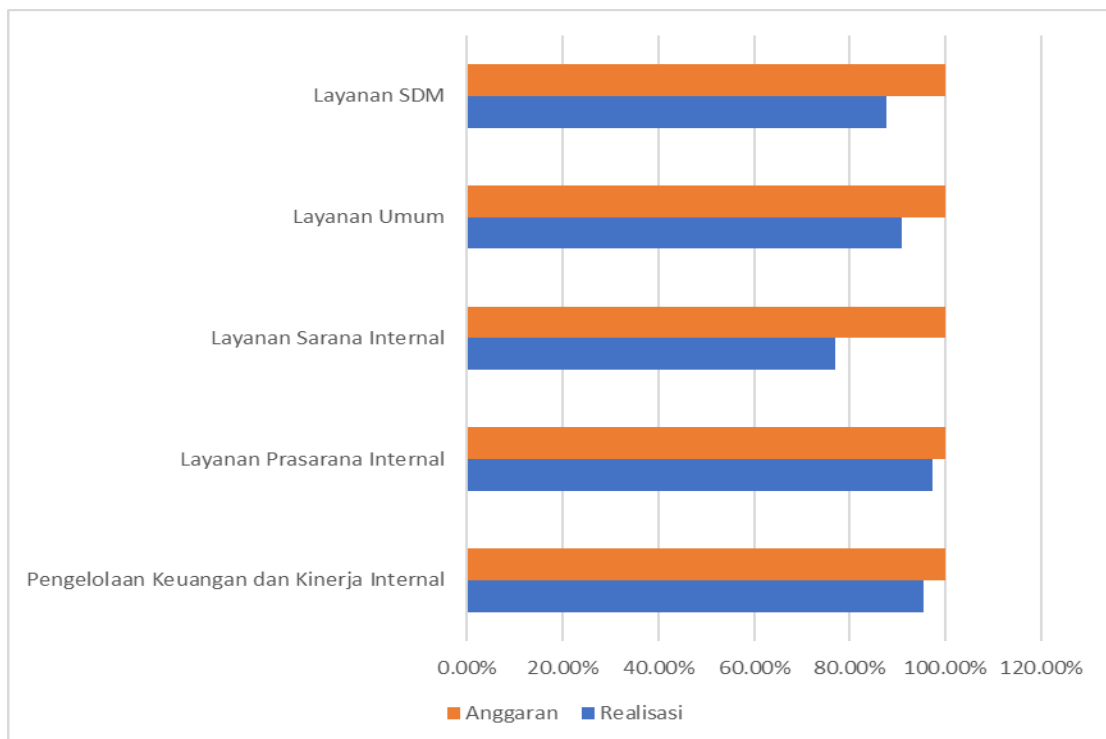
Sampai dengan 31 Desember 2021 (Triwulan IV Tahun 2021), Balai Diklat Keuangan Manado telah menyerap anggaran sebanyak Rp 3.502.321.817 atau sebesar 87,04% dari total anggaran. Rincian realisasi dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Diagram 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1
Realisasi Belanja per Klasifikasi Rincian Output BDK Manado
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Saldo (Rp)
1		2	3	$4=(3/2) \times 100\%$	5=2-3
Program Dukungan Manajemen		4.024.005.000	3.502.321.817	87,04%	521.683.183
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM	1.358.963.000	1.192.882.071	87,78%	166.080.929
EAF	Layanan SDM	1.358.963.000	1.192.882.071	87,78%	166.080.929
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	2.665.042.000	2.309.439.746	86,66%	355.602.254
EAC	Layanan Umum	1.529.370.000	1.390.526.483	90,92%	138.843.517
EAD	Layanan Sarana Internal	914.906.000	704.018.333	76,95%	210.887.667
EAE	Layanan Prasarana Internal	219.506.000	213.693.430	97,35%	5.812.570

Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)		Rencana (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Saldo (Rp)
1		2	3	$4=(3/2) \times 100\%$	5=2-3
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1.260.000	1.201.500	95,36%	58.500

Diagram 3.1
Realisasi Belanja per Klasifikasi Rincian Output BDK Manado
s.d. Triwulan IV Tahun 2021



Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian anggaran serta permasalahan yang dihadapi dari masing-masing Klasifikasi Rincian Output yang telah dilaksanakan oleh BDK Manado selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

a. Layanan SDM

Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan SDM berjumlah Rp1.358.963.000 untuk membiayai 4 Rincian Output yaitu Gaji dan Tunjangan, Pengembangan SDM, Pembelajaran Digital (Pembelajaran Jarak Jauh), dan Manajemen Pengetahuan. Sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.192.882.071 atau 87.78% untuk membiayai Gaji dan Tunjangan pegawai, Pengembangan SDM (Capacity Building), serta membiayai Pembelajaran Digital yang terdiri dari Pelatihan Jarak Jauh, Ujian Sertifikasi dan Open Class. Rincian realisasi anggaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Layanan SDM
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
4683.EAF	Layanan SDM	1.358.963.000	1.192.882.071	87,78%	166.080.929
EAF.001	Gaji dan Tunjangan	1.009.191.000	987.804.580	97,88%	21.386.420
EAF.004	Pengembangan SDM	4.880.000	4.880.000	100,00%	-
EAF.008	Pembelajaran Digital	338.963.000	200.197.491	59,06%	138.765.509
EAF.017	Manajemen Pengetahuan	5.929.000	-	0%	5.929.000

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan (pembelajaran digital) berjumlah Rp 338.963.000 yang direncanakan untuk membiayai 13 pelatihan, satu ujian sertifikasi dan open class yang diselenggarakan Balai Diklat Keuangan Manado. Rincian realisasi anggaran untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelatihan dapat dilihat pada tabel 3.3, 3.4, dan diagram 3.2.

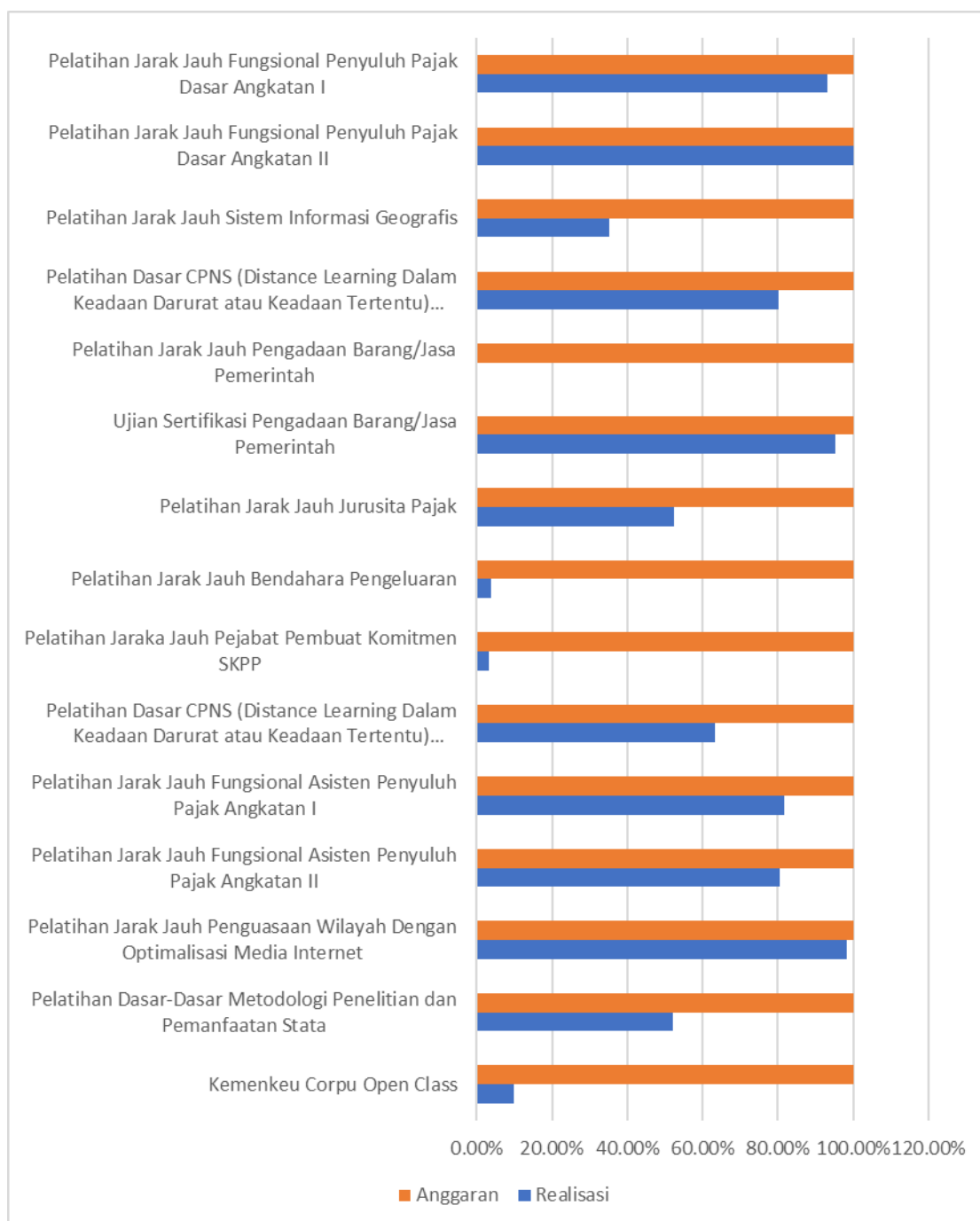
Tabel 3.3
Realisasi Anggaran Pelatihan per Subkomponen
Klasifikasi Rincian Output Layanan SDM
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Kode	Rincian Output/ Subkomponen	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
EAF.008	Pembelajaran Digital	338.963.000	200.197.491	59,06%	138.765.509
A	Pembelajaran Jarak Jauh	231.023.000	122.712.491	53,12%	108.310.509
B	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu)	107.940.000	77.485.000	71,79%	30.455.000
Total		338.963.000	200.197.491	59,06%	138.765.509

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran per Pelatihan
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

No	Diklat	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Selisih
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	7.825.000	7.293.750	93,21%	531.250
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	8.655.000	8.655.000	100,00 %	-
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	8.495.000	3.000.000	35,31%	5.495.000
4	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	53.970.000	43.360.000	80,34%	10.610.000
5	Pelatihan Jarak Jauh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	9.200.000	-	0%	9.200.000
6	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	19.170.000	18.263.741	95,27%	906.259
7	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	16.700.000	8.750.000	52,40%	7.950.000
8	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran	9.400.000	350.000	3,72%	9.050.000
9	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen SKPP	9.050.000	300.000	3,31%	8.750.000
10	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	53.970.000	34.125.000	63,23%	19.845.000
11	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan I	22.000.000	17.950.000	81,59%	4.050.000
12	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan II	22.000.000	17.725.000	80,57%	4.275.000
13	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	12.850.000	12.625.000	98,25%	225.000
14	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	45.678.000	23.800.000	52,10%	21.878.000
15	Kemenkeu Corpu Open Class	40.000.000	4.000.000	10,00%	36.000.000
Total		338.963.000	200.197.491	59,06%	138.765.509

Diagram 3.2
Penyerapan Anggaran per Pelatihan
s.d. Triwulan IV Tahun 2021



Berdasarkan Tabel dan Diagram diatas, masih banyaknya pelatihan yang belum menyerap anggaran secara maksimal dikarenakan pandemi Covid-19 yang belum berakhir sehingga banyak pelatihan yang seharusnya klasikal diubah menjadi pelatihan jarak jauh.

b. Layanan Umum

Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Umum berjumlah Rp1.529.370.000 untuk membiayai tiga Rincian Output yaitu Operasionalisasi Kantor, Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran, serta Kerumahtanggaan. Sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.390.526.483 atau 90,92% untuk membiayai seluruh rincian output yang ada. Rincian realisasi anggaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Layanan Umum
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6=3-4
4679.EAC	Layanan Umum	1.529.370.000	1.390.526.483	90,92%	138.843.517
EAC.001	Operasionalisasi Kantor	1.514.470.000	1.377.092.033	90,93%	137.377.967
EAC.002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	5.100.000	4.359.950	85,49%	745.050
EAC.003	Kerumahtanggaan	9.800.000	9.074.500	92,60%	725.500

c. Layanan Sarana Internal

Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana Internal berjumlah Rp 914.906.000 untuk membiayai tiga Rincian Output yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Peralatan Fasilitas dan Perkantoran, serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 704.018.333 atau 76,95% untuk membiayai seluruh rincian output yang ada. Rincian realisasi anggaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.6.

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana Internal
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	$5=(4/3) \times 100\%$	6=3-4
4679.EAD	Layanan Sarana Internal	914.906.000	704.018.333	76,95%	210.887.667
EAD.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	168.860.000	114.946.437	68,07%	53.913.563

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
EAD.003	Peralatan Fasilitas dan Perkantoran	723.452.000	574.909.396	79,47%	148.542.604
EAD.004	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	22.594.000	14.162.500	62,68%	8.431.500

d. Layanan Prasarana Internal

Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Prasarana Internal berjumlah Rp 219.506.000 untuk membiayai satu Rincian Output yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp213.693.430 atau 97,35% untuk membiayai Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, dengan rincian untuk pemeliharaan taman BDK, asrama, perpustakaan, pos satpam, halaman kantor, dan studio beserta alat-alatnya.

e. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal

Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal berjumlah Rp 1.260.000 untuk membiayai 2 Rincian Output yaitu Laporan Keuangan Unit dan Laporan Kinerja Unit. Sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.201.500 atau 95,36% untuk membiayai penggandaan dan penjiilidan Laporan Kinerja serta Laporan Keuangan. Rincian realisasi anggaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.7.

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Kode	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Anggaran			
		Rencana	Realisasi	% Capaian	Saldo
1	2	3	4	5=(4/3)X100%	6=3-4
4679.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	1.260.000	1.201.500	95,36%	58.500
EAN.001	Laporan Keuangan Unit	540.000	495.000	91,67%	45.000
EAN.003	Laporan Kinerja Unit	720.000	706.500	98,13%	13.500

B. PELAKSANAAN DAN EVALUASI KINERJA KEGIATAN

Rencana dan realisasi capaian keluaran (output) sampai dengan Tanggal 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel 3.8.

Tabel 3.8
Rencana dan Realisasi Keluaran (Output) Kegiatan
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Kode	Kegiatan/ Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(3/4)X100%
4683	Pengelolaan Organisasi dan SDM				
EAF	Layanan SDM	49.924	53.389	Orang	106,94%
4679	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum				
EAC	Layanan Umum	36	36	Bulan	100,00%
EAD	Layanan Sarana Internal	299	299	Unit	100,00%
EAE	Layanan Prasarana Internal	9.955	9.955	m2	100,00%
EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	10	10	Dokumen	100,00%

Berikut ini akan disajikan secara lebih rinci mengenai realisasi dan capaian serta permasalahan yang dihadapi dari keluaran masing-masing Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang telah dilaksanakan oleh Balai Diklat Keuangan Manado sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021.

a. Layanan SDM

Keluaran (output) dari KRO Layanan SDM terdiri atas 4 Rincian Output, yaitu Gaji dan Tunjangan, Pengembangan SDM, Pembelajaran Digital (Pembelajaran Jarak Jauh), dan Manajemen Pengetahuan. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 keluaran (output) dari KRO Layanan SDM telah terealisasi sebesar 106,94% yang berasal dari realisasi Rincian Output Pembelajaran Digital sejumlah 53.346 jamlator dari rencana 49.882 jamlator, realisasi Rincian Output Gaji dan Tunjangan sejumlah 20 pegawai, realisasi Rincian Output Pengembangan SDM sejumlah 20 pegawai, serta realisasi Rincian Output Manajemen Pengetahuan sejumlah tiga aset intelektual. Data rencana dan realisasi keluaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut ini.

Tabel 3.9
Rencana dan Realisasi per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Layanan SDM
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(3/4)X100%
4683.EAF	Layanan SDM	49.924	53.389	Orang	106,94%

No	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(3/4)X100%
EAf.001	Gaji dan Tunjangan	20	20	Pegawai	100%
EAf.004	Pengembangan SDM	20	20	Pegawai	100%
EAf.008	Pembelajaran Digital	49.882	53.346	Jamlator	106,94%
EAf.017	Manajemen Pengetahuan	2	3	Aset intelektual	150%

Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021, keseluruhan 13 pelatihan dan satu ujian sertifikasi di Balai Diklat Keuangan Manado telah selesai dilaksanakan. Realisasi keluaran (output) dari pelatihan (Pembelajaran Digital) yang telah dilaksanakan yaitu sejumlah 53.346 jamlator dari rencana 49.882 jamlator. Data realisasi jamlator per Pelatihan selama Triwulan IV dapat dilihat pada tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10
Realisasi Jamlator per Pelatihan
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

Diklat		Peserta		Jamlat	Realisasi Jamlator
		Rencana	Realisasi		
1	2	3	4	5=3x4	
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	28	28	76	2.128
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	30	30	76	2.280
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	33	33	58	1.914
4	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	40	40	405	16.200
5	Pelatihan Jarak Jauh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	35	34	40	1.360
6	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	35	-	-	-
7	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	41	41	66	2.706
8	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran	35	27	44	1.188
9	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen SKPP	49	28	42	1.176
10	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	40	40	405	16.200
11	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan I	30	29	69	2.001

Diklat		Peserta		Jamlat	Realisasi Jamlator
		Rencana	Realisasi		
1		2	3	4	5=3x4
12	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan II	30	29	69	2.001
13	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	33	32	65	2.080
14	Pelatihan Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pemanfaatan Stata	25	22	96	2.112
Total		459	413	1.511	53.346

Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Pembuat Komitmen memiliki realisasi peserta yang jauh dari rencana dikarenakan jumlah rencana peserta pada rencana kegiatan pelatihan (kalender pelatihan) masih belum direvisi. Berkaitan dengan ujian sertifikasi yang tidak memiliki realisasi jamlator disebabkan karena ujian sertifikasi tidak mempunyai jamlat.

b. Layanan Umum

Keluaran (output) dari KRO Layanan Umum terdiri atas tiga Rincian Output, yaitu Operasionalisasi Kantor, Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran, serta Kerumahtanggaan. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 keluaran (output) dari KRO Layanan Umum telah terealisasi sebesar 100% dengan rincian, realisasi Operasionalisasi Kantor sejumlah 12 bulan dari rencana 12 bulan, realisasi Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran sejumlah 12 bulan dari rencana 12 bulan, dan realisasi Kerumahtanggaan sejumlah 12 bulan dari rencana 12 bulan. Data rencana dan realisasi keluaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Rencana dan Realisasi per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Layanan Umum
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(3/4)X100%
4679.EAC	Layanan Umum	36	36	Bulan	100,00%
EAC.001	Operasionalisasi Kantor	12	12	Bulan	100,00%
EAC.002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12	12	Bulan	100,00%
EAC.003	Kerumahtanggaan	12	12	Bulan	100,00%

c. Layanan Sarana Internal

Keluaran (output) dari KRO Layanan Sarana Internal terdiri atas tiga Rincian Output, yaitu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Peralatan Fasilitas dan Perkantoran, serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 keluaran (output) dari KRO Layanan Sarana Internal telah terealisasi sebesar 100% dengan rincian, realisasi Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sejumlah 96 unit dari rencana 96 unit, realisasi Peralatan Fasilitas dan Perkantoran sejumlah 198 unit dari rencana 198 unit, dan realisasi Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sejumlah 5 unit dari rencana 5 unit. Data rencana dan realisasi keluaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut ini.

Tabel 3.12
Rencana dan Realisasi per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana Internal
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(3/4)X100%
4679.EAD	Layanan Sarana Internal	299	299	Unit	100,00%
EAD.002	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	96	96	Unit	100,00%
EAD.003	Peralatan Fasilitas Perkantoran	198	198	Unit	100,00%
EAD.004	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	5	5	Unit	100,00%

d. Layanan Prasarana Internal

Keluaran (output) dari KRO Layanan Prasarana Internal terdiri atas satu Rincian Output, yaitu Pemeliharaan Gedung dan Bangunan. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 keluaran (output) dari KRO Layanan Prasarana Internal telah terealisasi sebesar 100% yang berasal dari realisasi Rincian Output Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sejumlah 9.955 m² dari rencana 9.955 m². Rincian Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yaitu pemeliharaan taman BDK sejumlah 4432 m², studio sejumlah 128,92 m², pagar pembatas rumah dinas 28m², perpustakaan sejumlah 57m², kelas dan asrama 92m², pos satpam sejumlah 24m², ABW gedung kantor 25m², asrama sejumlah 70m², dan pemeliharaan halaman BDK sejumlah 5.098,08 m².

e. Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal

Keluaran (output) dari KRO Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal terdiri atas 2 Rincian Output, yaitu Laporan Keuangan Unit dan Laporan Kinerja Unit. Sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 keluaran (output) dari KRO

Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal telah terealisasi sebesar 100% yang berasal dari realisasi Rincian Output Laporan Kinerja Unit sejumlah 8 laporan dari rencana 8 laporan dan realisasi Rincian Output Laporan Keuangan unit sejumlah 2 laporan dari rencana 2 laporan. Data rencana dan realisasi keluaran per Rincian Output dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut ini.

Tabel 3.13
Rencana dan Realisasi per Rincian Output
Klasifikasi Rincian Output Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

No	Klasifikasi Rincian Output/ Rincian Output	Keluaran			
		Rencana	Realisasi	Satuan	% Capaian
1	2	3	4	5	6=(3/4)X100%
4679.EAN	Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal	10	10	Dokumen	100,00%
EAN.001	Laporan Keuangan Unit	2	2	Laporan	100,00%
EAN.003	Laporan Kinerja Unit	8	8	Laporan	100,00%

C. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

a. Rekapitulasi Capaian IKU BDK Manado Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021

Berkaitan dengan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Keuangan Manado Periode Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2021, dapat disampaikan sebagaimana tabel 3.14 berikut ini :

Tabel 3.14
Target dan Capaian IKU BDK Manado
s.d. Triwulan IV Tahun 2021

No	Kode IKU	Uraian IKU	Target Tahun 2021	s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Target	Realisasi	
1.	1a-CP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%	99.64%	Hingga akhir Desember 2021, rekomendasi yang telah ditindak lanjuti adalah 51 rekomendasi dari 51 rekomendasi yang telah jatuh tempo atau realisasi sebesar 100%.
2.	1b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41 (skala 5)	4,41	4,63	IKU ini diperhitungkan secara tahunan dengan data tersedia dari Sekretariat Jenderal. Berdasarkan laporan yang diterima Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diterima, BPPK mendapatkan nilai sebesar 4.63
3.	2a-N	Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran	4,33 (skala 5)	4.33	4.63	Berdasarkan penilaian butir evaluasi yang telah dilakukan oleh peserta dalam total 13 pelatihan yang telah diselenggarakan, capaian per Desember 2021 adalah 106.94%.

No	Kode IKU	Uraian IKU	Target Tahun 2021	s.d. Triwulan IV		Keterangan
				Target	Realisasi	
4.	3a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Hingga akhir Desember 2021, rekomendasi yang telah ditindak lanjuti adalah 59 rekomendasi dari 59 rekomendasi yang telah jatuh tempo atau realisasi sebesar 100%.
5.	4a-CP	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	5 (skala 5)	5	5	Berdasarkan penilaian dari tiap-tiap komponen perhitungan standar kualitas pembelajaran, BDK Manado mendapatkan nilai akhir total sebagai berikut : 1. Semester I mendapatkan capaian sebesar 99,4 (Indeks = 5) 2. Semester II mendapatkan capaian sebesar 99,7 (Indeks = 5)
6.	5a-CP	Indeks persepsi integritas	90,10 (skala 100)	90,10	91,06	Indeks penilaian integritas (IPI) 2021. Nilai BPPK: 91,06 Untuk nilai responden internal dan eksternal akan di sampaikan secara resmi dan lengkap dalam Laporan SPI 2021.
7.	5b-N	Persentase pelaksanaan kajian, knowledge capture, dan aktualisasi pembelajaran	100%	100%	120%	Capaian per Desember sebesar 109% dari target Q4 sebesar 100%.
8.	5c-N	Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%	85%	100%	Sampai akhir Tahun 2021 Persentase Penugasan Pelatihan yang sesuai dengan AKP mencapai 100%
9.	5d-N	Indeks efektivitas forum group discussion kebijakan Kementerian Keuangan	90 (skala 100)	90	97,80	FGD Triwulan I, II, dan III telah dilaksanakan namun belum terdapat realisasi karena berdasarkan informasi dari OTL Sekretariat BPPK dan CTO Kemenkeu, untuk seluruh Balai Diklat Keuangan yang masih dikepalai oleh Plt. belum ada hasil penilaian FGD untuk triwulan I hingga triwulan III-nya. Per Oktober 2021, BDK Manado sudah memiliki pejabat administrator Kepala Balai, maka per triwulan IV sudah memiliki capaian sebesar 97,80.
10.	5e-N	Persentase implementasi inovasi	100%	100%	100%	BDK Manado telah mengirimkan TOR Inovasi dan TOR telah mendapatkan persetujuan dari Sekretariat BPPK. Untuk capaian per Desember dengan target sebesar 100% Telah terealisasi 100%..
11.	6a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	97.70%	Secara keseluruhan, Balai Diklat Keuangan Manado sudah memenuhi target IKU PKPA pada triwulan IV, di mana target IKU PKPA adalah sebesar 95,5 dan realisasinya sebesar 97,70, atau dengan capaian sebesar 101,75%.
12.	6b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	100%	117,78%	Data dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Pelaporan dilakukan tiap semester.
13	7a-N	Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%	100%	109,39%	Capaian mencapai 109.39% berdasarkan 13 pelatihan yang telah diselenggarakan hingga akhir tahun.

Penjelasan atas Capaian IKU

1. Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik

Sasaran Strategis
Tata kelola dan Sumber Daya Kementerian yang optimal Tata kelola kementerian yang optimal adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparan, partisipatif dan akuntabel) sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan. Sumber daya kementerian yang optimal adalah SDM yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.
Indikator Kinerja Utama
Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik Lulusan berpredikat minimal baik adalah: - lulusan pelatihan teknis yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama - lulusan pelatihan fungsional yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama - lulusan pelatihan dasar dan kepemimpinan yang memperoleh nilai minimal 76 pada evaluasi pertama (bukan peserta mengulang) - lulusan program diploma yang memperoleh IPK minimal 3 (Predikat sangat memuaskan IPK 3-3,5) - lulusan program pre-departure training yang memperoleh nilai IBT minimal 79 atau IELTS 6,5 Kriteria minimal baik dapat berubah, sesuai dan akan mengikuti kriteria pada peraturan yang berlaku. Pembagi dalam IKU ini adalah seluruh peserta pendidikan dan pelatihan yang mengikuti ujian. Lulusan dari pelatihan yang tidak mensyaratkan hasil ujian sebagai syarat kelulusan tidak dimasukkan dalam perhitungan IKU ini. Peserta pelatihan hanya dari Kemenkeu.
Formula
$\frac{\text{Jumlah lulusan dengan predikat minimal baik}}{\text{Jumlah peserta ujian}} \times 100\%$

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.a-CP Persentase Lulusan Pendidikan dan Pelatihan dengan Predikat Minimal Baik	93%	99.64%	107.14%	93%	99.64%	107.14%

Penjelasan atas Capaian IKU

Sampai akhir tahun 2021, terdapat 13 pelatihan yang telah/sedang dilaksanakan di BDK Manado. Namun hanya 9 pelatihan yang diujikan, yaitu PJJ Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I, PJJ Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II, PJJ Juru Sita, PJJ Bendahara Pengeluaran, PJJ Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I, PJJ Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II, PJJ Pelatihan Dasar CPNS Angkatan II, PJJ Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet, dan PJJ Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III. Detail realisasi dan capaian dapat dilihat pada tabel dibawah :

Rincian lulusan per pelatihan sebagai berikut :

Nama Pelatihan Tatap Muka yang Memiliki Ujian Kelulusan	Peserta Ujian	Peserta Lulus	Lulusan Minimal Baik
Total	0	0	0

Nama Pelatihan Jarak Jauh yang Memiliki Ujian Kelulusan	Peserta Ujian	Peserta Lulus	Lulusan Minimal Baik
PJJ Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	28	28	28
PJJ Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	30	30	30
PJJ Juru Sita	41	41	41
PJJ Bendahara Pengeluaran	27	26	26
PJJ Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	29	29	29
PJJ Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	29	29	29
PJJ Pelatihan Dasar CPNS Angkatan II	40	40	40
PJJ Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	16	16	16
PJJ Pelatihan Dasar CPNS Angkatan III	40	40	40
TOTAL	280	279	279
Realisasi		99.64%	

2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Sasaran Strategis

Tata Kelola dan Sumber Daya Kementerian yang Optimal

Tata kelola kementerian yang optimal adalah penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparan, partisipatif dan akuntabel) sehingga mampu meningkatkan kepuasan pengguna layanan.

Sumber daya kementerian yang optimal adalah SDM yang mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan efektif dan efisien sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

Indikator Kinerja Utama

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

Tolok ukur untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan Kementerian Keuangan kepada unit-unit organisasi di lingkungan Kemenkeu atau stakeholders lainnya adalah melalui survei kepuasan pengguna layanan. Kementerian Keuangan berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Data capaian diperoleh dari survei yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal c.q. Biro Organta bekerjasama dengan Tim Peneliti independen dengan output berupa Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kementerian Keuangan. Lingkup survei adalah pengguna layanan atau stakeholders dan jenis layanan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Formula

Indeks Kepuasan Publik atas Layanan Kementerian Keuangan

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.b-CP Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,41	4,63	104,99	4,41	4,63	104,99

Penjelasan atas Capaian IKU

IKU ini diperhitungkan secara tahunan dengan data tersedia dari Sekretariat Jenderal. Berdasarkan laporan yang diterima Indeks Kepuasan Pengguna Layanan yang diterima, BPPK mendapatkan nilai sebesar 4.63

3. Indeks Persepsi Peserta Terhadap Proses Pembelajaran

Sasaran Strategis

Proses pembelajaran yang efektif

Proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang didesign dan dilaksanakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta pelatihan untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang gerak yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian peserta diklat sehingga dapat memfasilitasi peserta pelatihan untuk menguasai kompetensi yang diharapkan.

Indikator Kinerja Utama

Indeks persepsi peserta terhadap penyelenggaraan pembelajaran

Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran merupakan nilai yang menggambarkan apa yang dirasakan oleh peserta pelatihan mengenai pelayanan penyelenggaraan pembelajaran dan kualitas pengajar. Nilai ini diukur dengan skala 1-5. Alat survei dan metode penghitungan yang digunakan mengacu pada Peraturan Kepala BPPK nomor Per-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan (Klasikal dan e-learning) dan KEP-82/PP/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (distance learning) di Lingkungan BPPK.

Aspek yang diukur pada IKU ini adalah aspek persepsi/kenyataan, dengan butir penilaian sebagai berikut:

1. kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta pembelajaran;
2. bahan ajar mudah dipahami;
3. kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pembelajaran;
4. kesiapan penyelenggara pembelajaran dalam melayani peserta pembelajaran selama proses pembelajaran;
5. lingkungan belajar berfungsi dengan baik (meliputi ruang kelas dan asrama);
6. pengetahuan pengajar atas materi yang disampaikan;
7. kemampuan pengajar menyampaikan materi.

Dalam hal pelatihan diselenggarakan di luar fasilitas milik BPPK, maka poin 5 dikecualikan dari penghitungan IKU. Aspek nomor 5 pada PER-5/PP/2017: ketercukupan konsumsi(makanan/minuman) dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU. Tetap dievaluasi untuk perbaikan.

Aspek yang diukur pada IKU ini adalah aspek persepsi/kenyataan, dengan butir penilaian untuk pelatihan e-learning sebagai berikut:

1. kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta pembelajaran;
2. bahan ajar mudah dipahami;
3. kesesuaian metode pembelajaran dengan materi e-learning;
4. kesiapan penyelenggara pembelajaran dalam melayani peserta pembelajaran selama proses e-learning;

5. menu fasilitas e-learning mudah digunakan;
6. fasilitas e-learning dapat diakses setiap saat;
7. kemampuan pengajar dalam memberikan bimbingan secara online (hanya untuk e-learning dengan pembimbingan dari pengajar)

Aspek yang diukur pada IKU ini adalah aspek persepsi/kenyataan, dengan butir penilaian untuk pelatihan jarak jauh (PJJ) sebagai berikut:

1. kesesuaian materi pembelajaran dengan harapan/kebutuhan peserta pembelajaran;
2. bahan ajar mudah dipahami;
3. kesesuaian metode pembelajaran dengan materi pembelajaran jarak jauh;
4. ketercukupan waktu penyelenggaraan PJJ dengan materi yang diberikan;
5. kesigapan penyelenggara pembelajaran dalam melayani peserta pembelajaran selama proses pelatihan jarak jauh;
6. fasilitas pelatihan jarak jauh mudah diakses;
7. fasilitas pelatihan jarak jauh mudah digunakan;
8. kemampuan pengajar dalam memberikan bimbingan secara jarak jauh.

Aspek nomor 6 pada KEP-82/PP/2020: ketercukupan waktu dalam mengerjakan penugasan, kuis atau ujian dikeluarkan dari perhitungan capaian IKU. Tetap dievaluasi untuk perbaikan.

Formula

Peraturan Kepala BPPK nomor Per-5/PP/2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembelajaran di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KEP-82/PP/2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Jarak Jauh (PJJ):

No	Nama Pelatihan	Butir yang dievaluasi							Indeks persepsi (rata-rata butir 1 s.d. 7)
		1	2	3	4	5	6	7	
1									
2									
3									
dst									
Realisasi IKU									(rata-rata indeks persepsi seluruh pelatihan)

Realisasi = Rata-rata Indeks Evaluasi Pembelajaran dari setiap pelatihan yang diselenggarakan

rata-rata dihitung dari pelatihan di awal tahun, konsolidasi periode TLKV

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2.a-N Indeks Persepsi Peserta Pelatihan terhadap Proses Pembelajaran	4.33	4.63	106.94%	4.33	4.63	106.94%

Penjelasan atas Capaian IKU

Terdapat perubahan metode pelatihan dari klasikal menjadi Pelatihan Jarak Jauh, untuk butir-butir evaluasi yang dinilai mengalami perubahan sesuai dengan peraturan evaluasi pelatihan jarak jauh.

Rincian Realisasi per pelatihan adalah sebagai berikut:

Pelatihan Jarak Jauh

Nama Pelatihan	Butir yang dievaluasi								Indeks Persepsi
	1	2	3	4	5	6	7	8	
PJJ Fungsional Pajak Dasar Angkatan I Tahun Anggaran 2021	4.79	4.86	4.75	4.68	4.82	4.93	4.89	4.88	4.83
PJJ Fungsional Pajak Dasar Angkatan II Tahun Anggaran 2021	4.4	4.57	4.53	4.4	4.67	4.5	4.47	4.64	4.52
PJJ Sistem Informasi Geografis Tahun Anggaran 2021	4.52	4.55	4.52	4.36	4.64	4.58	4.66	4.65	4.56
Pelatihan Jarak Jauh Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	4.62	4.53	4.56	4.47	4.65	4.53	4.53	4.71	4.58
Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	4.63	4.61	4.54	4.41	4.39	4.34	4.56	4.56	4.51
Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran	4.67	4.59	4.59	4.3	4.56	4.63	4.59	4.74	4.58
Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen	4.68	4.64	4.68	4.61	4.79	4.68	4.68	4.85	4.70
Pelatihan Jarak Jauh Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	4.59	4.59	4.55	4.62	4.66	4.66	4.66	4.66	4.62
Pelatihan Jarak Jauh Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	4.72	4.83	4.86	4.76	4.86	4.83	4.79	4.9	4.82
PJJ Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	4.84	4.84	4.88	4.81	4.91	4.81	4.81	4.8	4.84
Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	4.6	4.53	4.58	4.35	4.75	4.3	4.45	4.79	4.54
Pelatihan Jarak Jauh Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data	4.59	4.41	3.82	4.36	4.95	4.77	4.77	4.7	4.55
Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	4.68	4.45	4.43	4.53	4.63	4.43	4.55	4.75	4.56

Rata-rata Indeks Persepsi adalah 4.63

4. Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pelatihan yang Ditindaklanjuti

Sasaran Strategis

Evaluasi Kinerja Konstruktif

Evaluasi kinerja konstruktif adalah evaluasi atas kinerja yang mampu menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang bersifat membangun dan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan pelatihan selanjutnya.

Indikator Kinerja Utama

Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pelatihan yang Ditindaklanjuti

Rekomendasi pelatihan adalah rekomendasi yang didapatkan dari hasil evaluasi

yang dilakukan oleh peserta pelatihan, baik yang didapatkan melalui evaluasi melalui kuesioner maupun evaluasi tatap muka.

Hasil evaluasi dari peserta pelatihan ini akan dibahas pada rapat yang dilakukan minimal setiap bulan sekali. Rekomendasi dari peserta pelatihan ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat tindak lanjut (primer, sekunder dan tersier).

Tindak lanjut primer adalah jika ada keluhan maka akan ditindaklanjuti sesegera mungkin (on the spot). Tindak lanjut sekunder adalah jika ada keluhan maka akan ditindaklanjuti selama pelatihan berjalan. Sedangkan tindak lanjut tersier adalah tindak lanjut atas keluhan yang baru bisa dilaksanakan pada periode pelatihan berikutnya.

Rekomendasi yang harus ditindaklanjuti adalah:

1. Rekomendasi yang tidak bisa ditindaklanjuti segera (pada saat pelatihan sedang berlangsung);
2. Rekomendasi yang diterima oleh unit terkait dan disetujui dalam rapat evaluasi untuk ditindaklanjuti.

Formula

$$\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Rekomendasi yang harus selesai ditindaklanjuti pada saat periode pelaporan}} \times 100\%$$

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3.a-N Persentase Penyelesaian Rekomendasi Pelatihan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan atas Capaian IKU

Rincian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti :

Periode	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Triwulan	Jumlah rekomendasi yang belum jatuh	Jumlah rekomendasi yang harus selesai ditindaklanjuti pada saat periode	Jumlah rekomendasi yang selesai	Capaian
Januari	0	13	0	0	0	-
Februari	13		11	2	2	100%
Maret	0		0	13	13	100%
April	3	12	3	13	13	100%
Mei	0		3	13	13	100%
Juni	9		3	22	22	100%
Juli	9	21	3	31	31	100%
Agustus	5		5	34	34	100%
September	7		7	39	39	100%
Oktober	8	10	8	46	46	100%
November	5		5	54	54	100%
Desember	0		0	59	59	100%

Seluruh rekomendasi pelatihan selama triwulan IV tahun 2021 telah ditindaklanjuti secara tepat waktu dengan hasil perhitungan capaian sebesar 100%.

5. Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran

Sasaran Strategis
Pengendalian mutu pembelajaran yang efektif Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan mutu dan kualitas suatu produk atau layanan pembelajaran yang dihasilkan telah sesuai dengan standar dan janji layanan, serta dilakukan secara profesional dan konsisten.
Indikator Kinerja Utama
Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran mengukur tingkat kualitas penyelenggaraan pembelajaran dengan berdasar pada standar mutu pembelajaran yang berlaku di BPPK. Pengukuran Kualitas Pembelajaran mengacu pada Keputusan Kepala BPPK nomor KEP-97/PP/2018, KEP-124/PP/2019 dan KEP-50/PP/2020. Jika terdapat pedoman yang belum ditetapkan, maka pelaksanaan penjaminan mutu berpedomana pada peraturan atau keputusan terkait: - analisis kebutuhan pembelajaran; - desain pembelajaran; - validasi program; - penyelenggaraan pembelajaran; - evaluasi pembelajaran; dan - sarana dan prasarana pembelajaran. Pelaksanaan penjaminan kualitas pembelajaran dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan. Kriteria yang diuji dalam penjaminan kualitas pembelajaran meliputi kelengkapan dokumen, keabsahan dokumen, kualitas isi, akurasi waktu, dan keamanan informasi. Ruang lingkup dan pembobotan penilaian penjaminan kualitas pembelajaran pada Pusdiklat dan Balai Diklat mengikuti Standar Mutu Pembelajaran terbaru
Formula
Indeks 5 = 90-100 Indeks 4 = 80-89,99 Indeks 3 = 70-79,99 Indeks 2 = 50-69,99 Indeks 1 = 0-49,99

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4.a-CP Indeks Pemenuhan Standar Kualitas Pembelajaran	5	5	100%	5	5	100%

Penjelasan atas Capaian IKU

No	Komponen	Bobot	Nilai S1	Nilai Akhir S1	Nilai S2	Nilai Akhir S2
1.	Penyelenggaraan Pembelajaran	46%	100,00	46,00	99,33	45,70
2.	Evaluasi Pembelajaran	30%	100,00	30,00	100,00	30,00
3.	Sarana dan Prasarana Pembelajaran	24%	97,30	23,40	100,00	24,00
Nilai Akhir		100%		99,40 Indeks: 5		99,70 Indeks: 5

Semester 1 : Berdasarkan penilaian dari tiap-tiap komponen perhitungan standar kualitas pembelajaran, BDK Manado mendapatkan nilai akhir total sebesar 99,4 yang berdasarkan perhitungan indeks mendapatkan nilai 5 untuk penjaminan mutu yang dilaksanakan pada semester 1.

Semester 2 : Berdasarkan penilaian dari tiap-tiap komponen perhitungan standar kualitas pembelajaran, BDK Manado mendapatkan nilai akhir total sebesar 99,7 yang berdasarkan perhitungan indeks mendapatkan nilai 5 untuk penjaminan mutu yang dilaksanakan pada semester 2.

6. Indeks Persepsi Integritas

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal.

Indikator Kinerja Utama

Indeks Persepsi Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan

mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi.

* Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan (November T-1 s.d. Oktober T).

* Responden terdiri dari :

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal 1 tahun di Unit Sampel
- Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu 12 bulan

* Unit Sampel dalam Pelaksanaan SPI dengan kriteria sebagai berikut, diantaranya adalah :

- Representasi UE I, zona, risiko, dan pertimbangan lain.
- Unit kerja pelayanan publik dan non pelayanan publik, setara eselon II dan III dari setiap eselon I.
- Risiko unit kerja (Tingkat kerawanan indikasi penyimpangan integritas/KKN) : rendah, sedang, dan tinggi.
- Jumlah penerimaan dan pengeluaran negara yang dikelola selama satu periode
- Frekuensi layanan kepada pengguna eksternal

Ukuran populasi dipilih secara Purposive berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Pengambilan sampel dilakukan secara random/acak dari populasi dengan memerhatikan proporsi setiap eselon I dan keterwakilannya di setiap zona (Proportional Stratified Random Sampling).

* Komponen Penilaian Integritas terdiri dari:

Internal

- Budaya Organisasi;
- Sistem Anti Korupsi;
- Pengelolaan SDM; dan
- Pengelolaan Anggaran.

Eksternal

- Transparansi
- Sistem Anti Korupsi
- Integritas Pegawai

Penilaian integritas dilakukan pada Q3 s.d Q4 tahun berjalan dengan pelaporan capaian paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Formula

Capaian IKU = (45% x nilai internal) + (45% x nilai eksternal) + (10% x nilai FGD) - Faktor Koreksi

"*) Faktor Koreksi berupa angka pengurang indeks sebesar maksimal 17, dengan rincian:

- OTT (minus 5)
- Investigasi (minus 6)
- Pengondisian (minus 3)
- Informasi APH (minus 3)"

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.a-CP Indeks Persepsi Integritas	90,10%	91,60%	101,07%	90,10%	91,60%	101,07%

Penjelasan atas Capaian IKU

Indeks penilaian integritas (IPI) 2021.

Nilai BPPK: 91,06

Untuk nilai responden internal dan eksternal akan di sampaikan secara resmi dan lengkap dalam Laporan SPI 2021.

7. Persentase Pelaksanaan Kajian, Knowledge Capture, dan Aktualisasi Pembelajaran

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu memwadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Persentase Pelaksanaan Kajian, Knowledge Capture, dan Aktualisasi Pembelajaran

a. Kajian:

- Kegiatan mengkaji secara sistematis dan menyeluruh dalam rangka mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang keuangan negara, bidang manajemen SDM dan bidang kediklatan.
- Maksimal dilaksanakan oleh dua peneliti.
- Dituangkan dalam karya tulis ilmiah yang ditulis dengan kaidah penulisan akademis yang berlaku. Pengujian dalam bentuk presentasi/seminar digunakan untuk menguji aspek metodologis maupun substansi riset/penelitian.
- Presentasi/seminar dilakukan minimal satu kali untuk tahapan proposal dan satu kali untuk tahap hasil kajian/riset/penelitian.
- Target kajian disamakan dengan Rincian Output Kajian masing-masing Unit (pada dokumen penganggaran)

b. Knowledge Capture:

- Output dari kegiatan knowledge capture yang diakui dalam IKU ini adalah dalam knowledge capture yang dituangkan dalam bentuk buku, audio dan video dll (sesuai KEP-118/PP/2019). Rencana dan TOR/KAK pembuatan setiap buku/video harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Pusdiklat.
- Pembuatan video knowledge capture mengenai teaching/learning method atau pengayaan materi diklat.
- Target masing-masing unit adalah 4 x jumlah Dosen/WI
- Target tambahan masing-masing unit adalah 2 Knowledge capture (di luar yang dihitung sebagai target individu WI/pegawai)

c. Aktualisasi Pembelajaran:

- Aktualisasi pembelajaran adalah kegiatan tindak lanjut dari pelatihan yang diikuti oleh pegawai BPPK (level eselon IV, pelaksana, dan fungsional selain WI dan Dosen). Tindak lanjut adalah implementasi hasil pembelajaran di tempat kerja (bukan sharing materi pembelajaran).
- Didokumentasikan dalam bentuk tulisan, video, pod cast, dll (sesuai KEP-118/PP/2019) untuk kemudian divalidasi oleh atasan dan diupload pada KLC/comet/intra BPPK/ftp setiap unit
- Divalidasi oleh atasan langsung (Eselon IV dan Eselon III; fungsional di validasi oleh bagian yang memiliki fungsi kepegawaian)
- Target masing-masing unit adalah 90% pegawai di Unitnya (yang pernah mengikuti pelatihan pada tahun 2021 dan mendapat sertifikat/badge) melakukan aktualisasi pembelajaran
- Pegawai yang menjadi target adalah pegawai yang melakukan pembelajaran (structured learning: misalnya pelatihan klasikal, e-learning, PJJ, seminar dll) pada 1 Januari 2021-30 November 2021, dan lulus/mengikuti sampai selesai (mendapatkan sertifikat/badge)
- Minimal setiap pegawai melakukan 1 kali aktualisasi pertahun (dapat memilih pembelajaran yang diterapkan di pekerjaan)
- WI dan Dosen yang sudah melakukan Kajian atau Knowledge Capture tidak wajib melakukan aktualisasi pembelajaran

- Bukti validasi berupa berita acara proses validasi yang ditandatangani oleh atasan dan pembuat aktualisasi pembelajaran

Formula

Realisasi IKU = (40% x capaian komponen A) + (30% x capaian komponen B) + (30% x capaian komponen C)

- Jika ada komponen yang NA, maka bobot komponen yang NA tersebut disebar ke komponen yang lain.
- Misalnya: tidak ada target kajian (komponen A), maka komponen B 50% dan komponen C 50%.
- Misalnya: hanya ada komponen C, maka 100% komponen C.

Komponen A :

Realisasi Komponen A = Jumlah Nilai seluruh riset / target Kajian pada Rincian Output

Capaian Komponen A = Realisasi / 100%

Capaian Maksimal adalah 120

Nilai Setiap Kajian adalah sebagai berikut:

Tahapan	Nilai
Pengajuan proposal	10%
Seminar proposal	15%
Penulisan	25%
Seminar Hasil	40%
Hasil penelitian siap dipublikasikan (telah diperbaiki dari hasil seminar)	10%
Total nilai setiap Kajian	100%

Komponen B :

Realisasi Komponen B = Jumlah Video yang diupload pada KLC/ [(4 x Jumlah WI/Dosen) +2]

Capaian Komponen B = Realisasi / 100%

Capaian Maksimal adalah 120

Komponen C :

Realisasi Komponen C = Jumlah pegawai target yang telah melakukan aktualisasi pembelajaran / Jumlah pegawai yang menjadi target

Capaian Komponen C = Realisasi / 90%

Capaian Maksimal adalah 120

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.b-N Persentase pelaksanaan kajian, knowledge capture, dan aktualisasi pembelajaran	100%	120%	120%	100%	120%	120%

Penjelasan atas Capaian IKU

BDK Manado hingga akhir Desember 2021 telah menyusun aktualisasi pembelajaran dengan detail sebagai berikut :

Periode		Target (output)	Realisasi (output)	Capaian tiap output
Q4	Knowledge Capture	2	3	120%
	Aktualisasi pembelajaran	14,4	17	120%

Capaian IKU = 50% x Capaian Knowledge Capture + 50% x Capaian Aktualisasi Pembelajaran

Realisasi IKU = (50% x 120%) + (50% x 120%) = 120%

8. Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP

Pelatihan adalah peningkatan keterampilan, serta pembentukan sikap dan perilaku dalam rangka pengembangan sumber daya manusia Kementerian Keuangan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan berbagai metode dan sumber untuk mendukung pencapaian target organisasi.

Analisis Kebutuhan Pembelajaran (AKP) adalah serangkaian proses analisis terhadap kesenjangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam rangka pengembangan sumber daya manusia dengan program-program pembelajaran guna mendukung pencapaian target kinerja organisasi di lingkungan Kementerian

Keuangan.

Rencana Penugasan pelatihan sesuai AKP mengacu pada rencana penugasan pelatihan pegawai BPPK tahun 2019 sebagaimana tercantum pada Nota Dinas Sekretaris Badan Nomor ND-3477/PP.1/2020 tanggal 31 Desember 2019 hal Rencana Penugasan Pelatihan Tahun Anggaran 2020.

Realisasi penugasan pegawai yang mengikuti pelatihan sesuai AKP dihitung berdasarkan jumlah penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP Jabatan dan AKP Individu.

- AKP Jabatan adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung pemenuhan kompetensi pemangku jabatan pada unit pengguna.

- AKP Individu adalah AKP yang dilaksanakan untuk mendukung kompetensi individu.

Termasuk dalam realisasi penugasan pelatihan yang mengalami:

1. Perubahan jadwal pelatihan; dan/atau

2. Penggantian pegawai yang ditugaskan

Dikeluarkan dari penghitungan adalah AKP yang tidak dapat dipenuhi karena program pelatihan batal diselenggarakan oleh BPPK pada tahun berjalan.

Formula

Realisasi =

Jumlah realisasi penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP reguler 2021 / Jumlah rencana penugasan pelatihan kompetensi hasil AKP reguler 2021 X 100%

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.c-N Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%	100%	117,65%	85%	100%	117,65%

Penjelasan atas Capaian IKU

Sampai akhir Tahun 2021 Persentase Penugasan Pelatihan yang sesuai dengan AKP mencapai 100%

9. Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kebijakan Kemenkeu

Sasaran Strategis
Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Indeks Efektivitas Pelaksanaan FGD Kebijakan Kemenkeu

Tingkat efektivitas FGD kode etik merupakan instrumen penilaian untuk mengukur keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD kepada pegawai di lingkungannya termasuk mengukur mengenai feedback peserta terhadap kegiatan FGD yang dilaksanakan.

Parameter yang diukur berdasarkan beberapa aspek yaitu delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator), understanding (pemahaman peserta terhadap materi FGD), learning enthusiasm (antusiasme pegawai terhadap kegiatan FGD), contribution to learning (dampak kegiatan FGD kepada peningkatan kapasitas pegawai).

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Kegiatan FGD dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Menteri Keuangan terkait Pelaksanaan Forum Group Discussion. Fokus materi FGD akan ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal melalui surat Kepala Biro SDM atas nama Sekretaris Jenderal kepada Sekretaris Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain terkait kode etik, akan terdapat tema lain dalam pelaksanaan FGD. Pengukuran efektivitas pelaksanaan FGD untuk seluruh tema yang ditetapkan oleh Setjen mengacu pada manual IKU ini.

Formula

Parameter yang diukur berdasarkan dua aspek yaitu:

- 1) kecepatan (seberapa cepat materi FGD disampaikan kepada pegawai sejak pelaksanaan Pra-FGD).
- 2) feedback peserta yang terdiri dari content, delivery, dan contribution.

Mekanisme pengukuran efektivitas dilakukan melalui:

- 1) Data pelaksanaan FGD yang ada di e-performance masing-masing Pejabat Administrator, dan
- 2) kuesioner yang dikoordinir oleh Setjen (CTO).

Aspek yang diukur dengan kuesioner (feedback) dari peserta (bawahan) yaitu:

- 1) Content (topik materi dan pesan yang disampaikan);

- 2) Delivery (cara penyampaian materi oleh Pejabat Administrator);
- 3) Contribution (dampak kegiatan FGD terhadap peningkatan kapasitas pegawai)

Contoh rincian pertanyaan kuesioner untuk menggali beberapa aspek di atas adalah:

1. Content
 - a. Relevansi topik dengan isu terkini di Kementerian Keuangan maupun sektor publik di Indonesia.
 - b. Pesan inti dari materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik.
2. Delivery
 - a. Pemateri menguasai topik yang dibawakan.
 - b. Terjadi dialog interaktif dan pemateri mampu menjawab pertanyaan.
3. Contribution
 - a. Materi yang disampaikan meningkatkan kapasitas pegawai.
 - b. Secara keseluruhan, kegiatan FGD bermanfaat.

Kuesioner bisa disusun dalam bentuk pertanyaan dengan opsi pilihan 'sangat tidak setuju' sampai dengan 'sangat setuju' (dengan skala 1 s.d. 10). Kemudian nilai akhir hasil rata-rata setiap aspek yang dinilai dikonversi ke skala 100.

Indeks efektivitas setiap pelaksanaan FGD Pejabat Administrator adalah rata-rata dari dua parameter sebagai berikut:

	No	Nilai/Angka	Waktu pelaksanaan FGD sejak Pra-FGD
1. Kecepatan	1	100	≤3 hari kerja
	2	90	4 - 7 hari kerja
	3	80	8 - 10 hari kerja
	4	70	>10 hari kerja
	5	0	tidak melaksanakan FGD

2. Feedback peserta	Rata-rata nilai kuesioner feedback peserta FGD
---------------------	--

Formula IKU Indeks Efektivitas	(40% x nilai kecepatan) + (60% x nilai feedback peserta)
---------------------------------------	---

Indeks efektivitas setiap pelaksanaan FGD kode etik Kebijakan Kemenkeu adalah sebagai berikut:

No	Nilai/Angka	Interpretasi
1	$90 \leq x \leq 100$	Sangat Efektif
2	$80 \leq x \leq 89$	Efektif
3	$70 \leq x \leq 79$	Cukup Efektif
4	$60 \leq x \leq 69$	Kurang efektif
5	< 60	Tidak Efektif

Formula IKU: Rata-rata indeks efektivitas pelaksanaan FGD

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.d-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Kebijakan Kemenkeu	90	97,80	109%	90	97,80	109%

Penjelasan atas Capaian IKU

FGD Triwulan I, II, dan III telah dilaksanakan namun belum terdapat realisasi karena berdasarkan informasi dari OTL Sekretariat BPPK dan CTO Kemenkeu, untuk seluruh Balai Diklat Keuangan yang masih dikepalai oleh Plt. belum ada hasil penilaian FGD untuk triwulan I hingga triwulan III-nya. Per Oktober 2021, BDK Manado sudah memiliki pejabat administrator Kepala Balai, maka per triwulan IV sudah memiliki capaian sebesar 97,80 dari target 90,00.

10. Persentase Implementasi Inovasi

Sasaran Strategis

Organisasi dan SDM yang optimal

Organisasi yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan organisasi Sekretariat Jenderal.

Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan.

SDM yang kompeten adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi.

Berkinerja tinggi adalah SDM yang melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal

Indikator Kinerja Utama

Persentase Implementasi Inovasi

Implementasi inovasi dilakukan dalam dua tahap, yaitu penyusunan TOR inovasi dan implementasi inovasi.

TOR Inovasi disampaikan kepada Sekretaris Badan dan sekurangnya berisi penjelasan tentang:

- a) Apa permasalahan yang dihadapi sebelum dilaksanakannya inovasi layanan;
- b) Bagaimana inovasi layanan dimaksud dapat memecahkan masalah tersebut;
- c) Dalam hal apa inovasi layanan dimaksud bersifat kreatif dan inovatif;
- d) Kapan implementasi inovasi direncanakan untuk diimplementasikan dan siapa saja pihak yang terlibat;
- e) Sumber daya apa saja yang akan digunakan untuk melaksanakan inovasi layanan dimaksud.

Implementasi inovasi dibuktikan dengan laporan yang sekurangnya berisi tentang:

1. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan implementasi dan solusi yang

diambil;

2. Manfaat dan output implementasi inovasi layanan;

3. Apakah inovasi layanan ini berkelanjutan dan dapat direplikasi.

Formula

Tahapan	Nilai
Penyusunan TOR	30%
Persetujuan Sekretaris Badan	20%
Implementasi	50%
Total	100%

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
5.e-N Persentase Implementasi Inovasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Penjelasan atas Capaian IKU

BDK Manado telah mengirimkan TOR (Term of Reference) atau KAK (Kerangka acuan kerja) Inovasi ke Sekretariat Badan dengan Nota Dinas Nomor ND-100/BPP.11/2021 dengan perihal "Penyampaian TOR Inovasi BDK Manado Tahun 2021". Inovasi yang diajukan adalah "Manado Fun Quiz". Persetujuan atas rancangan inovasi tersebut telah mendapat konfirmasi dari Sekretariat Badan bahwa TOR yang telah dikirimkan telah disetujui oleh Bagian OTL dan unit balai dipersilahkan untuk melaksanakan implementasi inovasi yang telah disusun berdasarkan TOR yang dikirimkan. Kegiatan implementasi telah dilakukan selama tahun 2021

11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Sasaran Strategis
Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Indikator Kinerja Utama

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU ""Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran"" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020."

Formula

Perhitungan realisasi IKU =	
Capaian IKU PKPA Triwulan I	= Capaian IKPA Januari s.d. Maret
Capaian IKU PKPA Triwulan II	= Capaian IKPA Januari s.d. Juni
Capaian IKU PKPA Triwulan III	= Capaian IKPA Januari s.d. September
Capaian IKU PKPA Triwulan IV	= 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.a-CP Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95,5%	97,70%	102,30%	95,5%	97,70%	102,30%

Penjelasan atas Capaian IKU

NO	KODE SATKER	SATUAN KERJA	CAPAIAN IKPA	CAPAIAN SMART (*)	CAPAIAN IKU PKPA
1	411868	Sekretariat BPPK	99,33	95,65	97,12
2	411874	Balai Diklat Kepemimpinan	99,22	96,65	97,68
3	477198	Politeknik Keuangan Negara STAN	98,58	93,07	95,27
4	561178	Balai Diklat Keuangan Yogyakarta	97,65	96,23	96,80
5	561182	Balai Diklat Keuangan Malang	95,78	96,15	96,00
6	561199	Balai Diklat Keuangan Medan	98,03	98,40	98,25
7	561204	Balai Diklat Keuangan Palembang	98,61	94,45	96,11
8	561225	Balai Diklat Keuangan Makassar	97,25	94,22	95,43
9	561232	Balai Diklat Keuangan Balikpapan	98,20	98,16	98,18
10	622429	Balai Diklat Keuangan Cimahi	96,17	93,84	94,77
11	636799	Balai Diklat Keuangan Manado	98,20	97,36	97,70
12	670138	Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan	97,44	98,10	97,84
13	670142	Pusdiklat Pajak	98,81	93,69	95,74
14	670159	Pusdiklat Bea dan Cukai	91,35	96,38	94,37
15	673097	Pusdiklat Keuangan Umum	94,30	98,27	96,68
16	675709	Pusdiklat Pengembangan Sumber Daya Manusia	97,80	96,54	97,04
17	675713	Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan	99,71	99,19	99,40
18	675720	Balai Diklat Keuangan Pekanbaru	94,73	98,06	96,73
19	675734	Balai Diklat Keuangan Pontianak	99,10	94,62	96,41
20	675741	Balai Diklat Keuangan Denpasar	97,97	98,45	98,26

(*) Capaian SMART level satker dihitung berdasarkan Nota Dinas Menteri Keuangan ND-6/MK.1/2021 Tanggal 20 Agustus 2021

Identifikasi Isu Utama, akar masalah, rencana tindakan dan aksi

1. Isu utama

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan I 2020 berdampak pada pelaksanaan kegiatan (operasional maupun non operasional) pada unit-unit di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), termasuk Balai Diklat Keuangan Manado di dalamnya. Pelatihan klasikal yang pada awal tahun masuk dalam kalender pelatihan, sebagian mengalami perubahan metode pelaksanaan menjadi pelatihan digital, dan sebagian lagi dibatalkan pelaksanaannya. Walaupun disadari, pelaksanaan pelatihan dengan metode digital sejalan dengan pencapaian strategi Corporate University yang dilaksanakan oleh BPPK. Sampai dengan bulan November TA 2021, Balai Diklat Keuangan Manado melaksanakan kegiatan pelatihan dengan metode digital, yaitu pelatihan jarak jauh (PJJ)/distance learning.

2. Akar masalah

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan metode digital (PJJ) dan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu di Balai Diklat Keuangan Manado pada periode Januari s.d. November TA 2021 membawa pengaruh terhadap pencapaian target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), khususnya pada indikator Penyerapan Anggaran. Kegiatan pelatihan dengan metode klasikal, yang sebelum terjadinya pandemi Covid-19 merupakan kegiatan yang menyerap anggaran belanja barang yang cukup signifikan, padahal di awal tahun sudah teralokasi anggarannya dalam DIPA Balai Diklat Keuangan Manado, berdasarkan Kalender Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado TA 2021 dinyatakan dibatalkan. Selain faktor sulitnya Balai Diklat Keuangan Manado mencari alternatif kegiatan untuk mendukung penyerapan anggaran yang tinggi pada triwulan I dan II, indikator Penyerapan Anggaran pada perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki bobot unsur yang tinggi, yaitu 15%.

Pada tanggal 26 Juli 2021, Balai Diklat Keuangan Manado atas persetujuan Kepala

BPPK dan pengesahan Direktur Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu) merevisi anggarannya dengan mengalihkan sebagian anggaran pelatihan menjadi belanja modal sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Namun, dikarenakan beberapa paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan nilai yang relatif besar harus dipenuhi dari luar daerah (pulau Jawa), maka pembayarannya yang semula dijadwalkan terealisasi pada bulan September dan Oktober tertunda pada bulan November. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya capaian nilai indikator Penyerapan Anggaran triwulan III dan indikator Deviasi Halaman III DIPA bulan Oktober.

Secara keseluruhan, Balai Diklat Keuangan Manado sudah memenuhi target IKU PKPA pada triwulan IV, di mana target IKU PKPA adalah sebesar 95,5 dan realisasinya sebesar 97,17, atau dengan capaian sebesar 101,75%.

3. Rencana Tindakan

- a. Menjaga pelaksanaan belanja pada tahun anggaran selanjutnya (TA 2022) tetap berorientasi pada capaian output dan outcome, tidak hanya pada penyerapan anggaran;
- b. Menjaga agar tiap-tiap indikator penilaian IKU PKPA dapat tercapai pada tahun anggaran selanjutnya.

4. Aksi

- a. Melakukan rapat koordinasi internal untuk menentukan strategi-strategi pencapaian IKU PKPA setiap bulan;
- b. Melakukan pemutakhiran data berkala terhadap kertas kerja penghitungan realisasi belanja sebagai alat pemantauan target-target belanja.

12. Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Sasaran Strategis

Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Indikator Kinerja Utama

Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2021 berfokus Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan, Penertiban administrasi rumah negara dan digitalisasi pengelolaan BMN. IKU ini diukur melalui beberapa komponen yakni persentase kesesuaian pelaksanaan RP4 (Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan), Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN, Persentase penyelesaian penertiban rumah negara, Indeks Kelengkapan Data Rumah Negara pada Profil Master Aset, Persentase Digitalisasi Pengelolaan BMN, Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan yang Ditindaklanjuti, dan Indeks Kepatuhan Pengisian RUP

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4

Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan, persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan, persentase pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan, dan Persentase pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan. Realisasi pelaksanaan pemindahtanganan dan penghapusan diukur ketika penyampaian usulan pelaksanaan Pemindahtanganan dan Penghapusan dari satuan kerja kepada Unit Eselon I yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Realisasi penggunaan dan pemanfaatan diukur ketika satuan kerja mengajukan usulan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kepada Unit Eselon I atau Pengelola Barang yang ditembuskan kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Rencana penggunaan yang diukur selain rencana Penggunaan BMN untuk digunakan sendiri sesuai tugas dan fungsi

2. Indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN

Penyusunan RP4 BMN dilaksanakan untuk mewujudkan Perencanaan BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang terarah. RP4 BMN meliputi Rencana Penggunaan, Rencana Pemanfaatan, Rencana Pemindahtanganan, dan Rencana Penghapusan. Ketepatan waktu dalam penyusunan perencanaan BMN diperlukan agar tersedianya waktu yang cukup dan optimal dalam penelitian dan review atas usulan Perencanaan BMN untuk dapat dihasilkannya Perencanaan yang efektif dan efisien. Penyampaian RP4 BMN setiap Unit Eselon I kepada Biro Madan. Target waktu berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Pengguna Barang sesuai dengan KMK nomor 855/KM.1/2018 tentang Perencanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, dan Penghapusan BMN di Lingkungan Kementerian Keuangan.

3. Persentase penyelesaian penertiban rumah negara

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan rumah negara yang tertib, terarah, dan akuntabel, serta sejalan dengan Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Periode 2020-2024. Penertiban Rumah Negara meliputi tiga aspek yaitu : (1) Aspek Administrasi, (2)

Aspek Hukum, dan (3) Aspek Fisik. Implementasi kegiatan tahun 2020 Penertiban Rumah Negara dari Aspek Administrasi ini adalah penyelesaian kelengkapan administrasi yang meliputi Surat Keputusan Penetapan Status Golongan (PSG) Rumah Negara, Penetapan Huruf Daftar Nomor (HDNo) Rumah Negara.

Realisasi PSG diukur pada saat draft penetapan status golongan rumah negara disampaikan kepada Biro Hukum (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang

pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan penetapan oleh Kepala Biro Manajemen BMN dan Pengadaan).

Realisasi HDNo diukur pada saat Unit Eselon I/Biro Umum maupun pejabat yang ditunjuk mendaftarkan rumah negara kepada Direktur Jenderal Cipta Karya dalam hal ini (apabila aturan terkait pelimpahan wewenang pengelolaan BMN telah ditetapkan, realisasi IKU diukur sampai dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang):

a) Direktur Bina Penataan Bangunan untuk rumah negara yang terletak di wilayah JABODETABEK;

b) Direktur Bina Penataan Bangunan melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis Provinsi yang membidangi rumah negara di provinsi untuk rumah negara yang terletak di luar wilayah

4. Persentase Completeness Master Aset

Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam mendukung pengambilan keputusan dan monitoring.

Profil BMN yang perlu dilengkapi untuk Rumah Negara yaitu

- a. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan),
- b. foto,
- c. dokumen berupa SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada)
- d. batas dan GPS,
- e. fasilitas, dan
- f. konstruksi.

5. Persentase jumlah tindak lanjut terhadap BMN Dihentikan Penggunaannya

Neraca BMN berfungsi memberikan informasi bagi pembacanya mengenai posisi keuangan (BMN) yang riil pada suatu entitas. Dalam rangka meningkatkan kualitas neraca dalam laporan BMN Kementerian Keuangan, perlu dieliminasi item-item yang nilainya masih tertera namun pada riilnya sudah tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan lagi, yang salah satunya adalah BMN yang sudah dihentikan penggunaannya.

Untuk dapat mengeliminasi BMN yang dihentikan penggunaannya dari neraca, BMN tersebut harus dilakukan proses penghapusannya (mulai dari usulan pemindahtanganan/penghapusan).

BMN dimaksud adalah BMN yang dihentikan penggunaannya berdasarkan data pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited, dilihat dari nilai perolehannya.

6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan

Pengelolaan BMN yang efektif dan efisien apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara optimal dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi.

Dalam rangka melaksanakan optimalisasi tersebut, Biro Manajemen BMN dan Pengadaan menetapkan RP4 sebagai rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle. Biro Manajemen BMN dan Pengadaan berkoordinasi dengan unit-unit terkait dan menyusun rencana tindak lanjut atas rekomendasi yang ditetapkan. Penyelesaian tindak lanjut sampai dengan dikeluarkannya produk pengelolaan bmn berupa usulan/persetujuan yang menjadi kewenangan pengguna barang.

7. Indeks Kepatuhan Pengisian RUP

Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah.

Salah satu informasi yang terdapat pada RUP adalah rencana pelaksanaan pengadaan. Informasi rencana pelaksanaan pengadaan akan membantu rencana penganggaran Kementerian. Oleh karena itu, satuan kerja wajib untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikembangkan oleh LKPP sebelum dilakukan pelaksanaan pengadaannya.

Bagian Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pengumuman RUP yang dilakukan satuan kerja. Standar ketentuan pengisian RUP dari LKPP yakni paling lambat sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan. Sehingga fokus pemantauan yang dilakukan yaitu kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki belanja modal dan belanja barang tahun anggaran 2022.

Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang menjadi target pengisian RUP berdasarkan pada Nota Dinas dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan setelah penetapan pagu alokasi anggaran Tahun 2022.

Formula

Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN diukur dari beberapa komponen yakni:

1. Kesesuaian pelaksanaan Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan

a. Persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana Pemanfaatan (target: 60%)

Realisasi a =	Jumlah pelaksanaan sewa BMN	x 100%
	Jumlah BMN dalam rencana pemanfaatan	

b. Persentase pelaksanaan Penggunaan atas Rencana Penggunaan (target: 60%)

Realisasi b =	Jumlah pelaksanaan penggunaan BMN	x 100%
	Jumlah BMN dalam rencana penggunaan	

c. Persentase Pelaksanaan Pemindahtanganan atas Rencana Pemindahtanganan (target: 60%)

Realisasi c =	Jumlah pelaksanaan pemindahtanganan BMN	x 100%
	Jumlah BMN dalam rencana pemindahtanganan	

d. Persentase Pelaksanaan Penghapusan atas Rencana Penghapusan (target: 60%)

Realisasi d =	Jumlah pelaksanaan penghapusan BMN	x 100%
	Jumlah BMN dalam rencana penghapusan	

Realisasi 1 =	$\frac{(\text{Realisasi a} / 60\%) + (\text{Realisasi b} / 60\%) + (\text{Realisasi c} / 60\%) + (\text{Realisasi d} / 60\%)}{4^*}$

*: disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu subkomponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah subkomponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki rencana penghapusan maka realisasi 1 diukur dengan formula $(\text{realisasi a} + \text{realisasi b}) / 2 \times 100\%$

2. Persentase ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN (target 100%)

Tabel indeks ketepatan waktu penyampaian RP4 BMN Tahun 2022 s.d 2024

Waktu Penyampaian	Indeks realisasi
Lebih cepat dua hari dan seterusnya	120%
Lebih cepat sehari	110%
Tepat waktu	100%
Terlambat satu hari	90%
Terlambat dua hari dan seterusnya	80%

3. Persentase Penyelesaian Penertiban Rumah Negara (target 65%)

Realisasi PSG =	Jumlah Pengajuan PSG	x 70%
	Target Pengajuan PSG pada Roadmap Penertiban Rumah Negara	

Realisasi HDNo=	Jumlah Pengajuan HDNo	x 30%
	Target Pengajuan HDNo pada Roadmap Penertiban Rumah Negara	

Realisasi 3 =	Realisasi PSG + Realisasi HDNo
	65%

4. Persentase Completeness Master Aset (target: 35%)

Persentase profil yang telah diisi lengkap =	Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara yang diisi lengkap	x 100%
	Jumlah Profil Master Aset Rumah Negara	

Realisasi 4 =	Persentase profil yang telah diisi lengkap	x 100%
	35%	

5. Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya (target 60%)

Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya =	jumlah nilai perolehan BMN yang dihentikan penggunaannya pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited yang ditindaklanjuti dengan usulan pemindahtanganan / penghapusan	x 100%
	jumlah nilai perolehan BMN dihentikan penggunaan yang tercantum pada Laporan Barang Pengguna Tahun 2020 unaudited	

Realisasi 5 =	Persentase tindak lanjut BMN Kemenkeu yang Dihentikan Penggunaannya
	60%

6. Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan (target 90%)

Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan =	Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti	x 100%
	Jumlah rekomendasi optimalisasi BMN terindikasi idle	

Realisasi 6 =	Persentase Rekomendasi Optimalisasi Aset Terindikasi Idle Kementerian Keuangan
	90%

7. Persentase Kepatuhan Pengisian RUP (target: 40%)

Persentase kepatuhan Pengisian RUP	Total RUP Belanja Barang dan Belanja Modal	x 100%
	Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 yang Menjadi Target	

Realisasi 7=	Persentase kepatuhan pengisian RUP
	40%

Realisasi IKU :

Realisasi Semester I =	Realisasi 1 + Realisasi 3 + Realisasi 4 + Realisasi 5 + Realisasi 6
	5**
Realisasi Semester II =	Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3 + Realisasi 4 + Realisasi 5 + Realisasi 6 + Realisasi 7
	7**

** : disesuaikan dengan jumlah komponen yang menjadi target. Apabila unit tidak memiliki salah satu komponen, penyebut disesuaikan dengan jumlah komponen yang ditargetkan pada unit tersebut. Contoh jika unit A tidak memiliki target PNPB maka realisasi IKU diukur dengan formula (realisasi 1+ realisasi 3 + realisasi 4)/3 x 100%

Catatan : Realisasi maksimal setiap komponen adalah 120%

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
6.b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	117,78%	117,78%	100.00%	117,78%	117,78%

Penjelasan atas Capaian IKU

Data dari Biro Manajemen BMN dan Pengadaan. Pelaporan dilakukan tiap semester.

13. Persentase Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik

Sasaran Strategis																																																									
Sistem Manajemen Informasi yang Andal Sistem manajemen informasi yang andal akan terwujud dengan adanya pengelolaan layanan TIK yang andal yaitu dengan ketersediaan sistem TIK, penyediaan dan pemenuhan layanan TIK, serta penyelesaian gangguan layanan TIK kepada pengguna layanan TIK sesuai ketentuan yang disepakati pada Katalog Layanan TIK, SLA, dan atau Business Impact Analysis (BIA).																																																									
Indikator Kinerja Utama																																																									
Persentase Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik IKU ini mengukur ketepatan waktu BDK dalam menginput kelengkapan data terkait penyelenggaraan pelatihan. Kegiatan yang menjadi tolak ukur kelengkapan data adalah: 1. Input nama pengajar; 2. Input rekapitulasi kehadiran peserta; 3. Pengiriman data kelulusan peserta. Pelatihan yang diperhitungkan dalam IKU ini adalah pelatihan yang diselenggarakan pada periode 1 Januari s.d. 30 November 2021. Penyelenggaraan open access, seminar dan diklat prajabatan dikecualikan dari penghitungan IKU ini.																																																									
Formula																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kegiatan</th><th>Waktu</th><th>Nilai</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">Input nama pengajar</td><td>s.d. H-1 pelatihan dibuka</td><td>110%</td></tr> <tr> <td>s.d pelatihan ditutup</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>Setelah penutupan</td><td>20%</td></tr> <tr> <td rowspan="7">Input rekap kehadiran</td><td>saat pelatihan ditutup:110%</td><td>110%</td></tr> <tr> <td>H+1 hari kerja setelah penutupan: 100%</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>H+2 hari kerja setelah penutupan: 90%</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>H+3 hari kerja setelah penutupan: 80%</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>H+4 hari kerja setelah penutupan: 70%</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>H+5 hari kerja penutupan: 50%</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>>H+5 hari kerja setelah penutupan : 20%</td><td>20%</td></tr> <tr> <td rowspan="7">Pengiriman data kelulusan peserta (non kelulusan)</td><td>< 15 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>110%</td></tr> <tr> <td>15 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>H+16 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>H+17 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>H+18 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>>H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>20%</td></tr> <tr> <td rowspan="7">Pengiriman data kelulusan peserta (pelatihan dengan kelulusan)</td><td>< 30 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>110%</td></tr> <tr> <td>30 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>100%</td></tr> <tr> <td>H+31 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>90%</td></tr> <tr> <td>H+32 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>80%</td></tr> <tr> <td>H+33 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>70%</td></tr> <tr> <td>H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>50%</td></tr> <tr> <td>>H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup</td><td>20%</td></tr> </tbody> </table>			Kegiatan	Waktu	Nilai	Input nama pengajar	s.d. H-1 pelatihan dibuka	110%	s.d pelatihan ditutup	100%	Setelah penutupan	20%	Input rekap kehadiran	saat pelatihan ditutup:110%	110%	H+1 hari kerja setelah penutupan: 100%	100%	H+2 hari kerja setelah penutupan: 90%	90%	H+3 hari kerja setelah penutupan: 80%	80%	H+4 hari kerja setelah penutupan: 70%	70%	H+5 hari kerja penutupan: 50%	50%	>H+5 hari kerja setelah penutupan : 20%	20%	Pengiriman data kelulusan peserta (non kelulusan)	< 15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%	15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%	H+16 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%	H+17 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%	H+18 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%	H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%	>H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%	Pengiriman data kelulusan peserta (pelatihan dengan kelulusan)	< 30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%	30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%	H+31 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%	H+32 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%	H+33 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%	H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%	>H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%
Kegiatan	Waktu	Nilai																																																							
Input nama pengajar	s.d. H-1 pelatihan dibuka	110%																																																							
	s.d pelatihan ditutup	100%																																																							
	Setelah penutupan	20%																																																							
Input rekap kehadiran	saat pelatihan ditutup:110%	110%																																																							
	H+1 hari kerja setelah penutupan: 100%	100%																																																							
	H+2 hari kerja setelah penutupan: 90%	90%																																																							
	H+3 hari kerja setelah penutupan: 80%	80%																																																							
	H+4 hari kerja setelah penutupan: 70%	70%																																																							
	H+5 hari kerja penutupan: 50%	50%																																																							
	>H+5 hari kerja setelah penutupan : 20%	20%																																																							
Pengiriman data kelulusan peserta (non kelulusan)	< 15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%																																																							
	15 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%																																																							
	H+16 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%																																																							
	H+17 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%																																																							
	H+18 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%																																																							
	H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%																																																							
	>H+19 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%																																																							
Pengiriman data kelulusan peserta (pelatihan dengan kelulusan)	< 30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	110%																																																							
	30 hari kalender setelah pelatihan ditutup	100%																																																							
	H+31 hari kalender setelah pelatihan ditutup	90%																																																							
	H+32 hari kalender setelah pelatihan ditutup	80%																																																							
	H+33 hari kalender setelah pelatihan ditutup	70%																																																							
	H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	50%																																																							
	>H+34 hari kalender setelah pelatihan ditutup	20%																																																							

Capaian IKU

IKU	s.d. 31 Desember 2021			Y		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
7.a-N Persentase Pemenuhan Basis Data Aplikasi Semantik	100%	109,39%	109,39%	100%	109,39%	109,39%

Penjelasan atas Capaian IKU

Rincian pemenuhan basis data aplikasi semantik :

No.	Nama Pelatihan	Stat us Diuj ikan	Jadwal		Penyelenggaraan						Evaluasi dan Informasi			Rata-rata
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Input nama pengajar			Input Rekap Kehadiran			Pengiriman Data Kelulusan Peserta			
					Deadline	Realisasi	Capaian	Deadline	Realisasi	Capaian	Deadline	Realisasi	Capaian	
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	Ya	1-Feb	9-Feb	1-Feb	30-Jan-21	110%	10-Feb-21	9-Feb-21	110%	11-Mar-21	25-Feb-21	110%	110%
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	Ya	15-Feb	23-Feb	15-Feb	9-Feb-21	110%	24-Feb-21	23-Feb-21	110%	25-Mar-21	8-Mar-21	110%	110%
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	Tidak	12-Apr	27 Agu 2021	12-Apr	12-Apr-21	100%	28 Agu 2021	14-Apr-21	110%	11-Sep-21	20-Apr-21	110%	107%
4	Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tidak	7-Jun	10-Jun	7-Jun	4-Jun-21	110%	11-Jun-21	10-Jun-21	110%	25-Jun-21	14-Jun-21	110%	110%
5	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	Ya	14-Jun	23-Jun	14-Jun	11-Jun-21	110%	24-Jun-21	23-Jun-21	110%	23-Jul-21	30-Jun-21	110%	110%
6	Pelatihan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu	Ya	28-Jun	6-Jul	28-Jun	21-Jun-21	110%	7-Jul-21	2-Jul-21	110%	5 Agu 2021	14-Jul-21	110%	110%
7	Pelatihan Pejabat Pembuat Komitmen	Tidak	5-Jul	9-Jul	5-Jul	8-Jul-21	100%	10-Jul-21	9-Jul-21	110%	24-Jul-21	7/14/2021	110%	107%
8	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	Ya	2 Agu 2021	13 Agu 2021	2 Agu 2021	27-Jul-21	110%	14 Agu 2021	13 Agu 2021	110%	12-Sep-21	8/28/2021	110%	110%
9	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	Ya	23 Agu 2021	2-Sep	23 Agu 2021	19 Agu 2021	110%	3-Sep-21	2-Sep-21	110%	2 Okt 2021	9/15/2021	110%	110%
10	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	Ya	27-Sep	15-Nov	27-Sep	21-Sep-21	110%	16-Nov-21	1 Okt 2021	110%	15 Des 2021	1-Dec-21	110%	110%
11	Pelatihan Jarak Jauh Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data	Tidak	14 Okt 2021	28 Okt 2021	14 Okt 2021	13 Okt 2021	110%	29 Okt 2021	28 Okt 2021	110%	12-Nov-21	2-Nov-21	110%	110%

Capaian mencapai 109.39% berdasarkan rata-rata capaian 11 pelatihan (Latsar tidak diperhitungkan) yang telah dilaksanakan hingga akhir bulan Desember tahun 2021. Berdasarkan data tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pemenuhan basis data semantik dapat terpenuhi secara tepat waktu.

Capaian tidak tercapai maksimal diakibatkan oleh terlambatnya input nama pengajar pada PJJ PPK yang di-deadline pada tanggal 5 Juli 2021 namun baru terealisasi pada tanggal 8 Juli 2021 dan PJJ Sistem Informasi Geografis pada 12 April 2021 namun terlaksana pada hari yang bersamaan (Untuk mencapai 110%, realisasi seharusnya dilakukan sebelum 12 April)

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis akuntabilitas kinerja, akuntabilitas keuangan, dan capaian IKU dari BDK Manado sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Anggaran yang diterima Balai Diklat Keuangan Manado di awal tahun berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-015.11.2.636799/2021 tanggal 23 November 2020 adalah sebesar Rp 4.874.125.000. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai Kegiatan Pengelolaan Keuangan, BMN, Umum, Organisasi, dan SDM dengan Klasifikasi Rincian Output (KRO) yang terdiri dari Layanan SDM, Layanan Umum, Layanan Sarana Internal, Layanan Prasarana Internal, dan Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal. Dalam perkembangannya terjadi 12 kali revisi anggaran. Revisi terakhir yaitu pada tanggal 28 Desember 2021, anggaran Balai Diklat Keuangan Manado sampai dengan revisi ke 12 yaitu sebesar Rp 4.024.005.000. Sampai dengan 31 Desember 2021 (Triwulan IV Tahun 2021), Balai Diklat Keuangan Manado telah menyerap anggaran sebanyak Rp 3.502.321.817 atau sebesar 87,04% dari total anggaran. Rincian serapan anggaran per Klasifikasi Rincian Output adalah:
 - a. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan SDM berjumlah Rp1.358.963.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.192.882.071 atau 87,78%. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan pelatihan (pembelajaran digital) berjumlah Rp 338.963.000 yang direncanakan untuk membiayai 13 pelatihan, satu ujian sertifikasi dan open class yang diselenggarakan Balai Diklat Keuangan Manado;
 - b. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Umum berjumlah Rp1.529.370.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.390.526.483 atau 90,92%;
 - c. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Sarana Internal berjumlah Rp 914.906.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 704.018.333 atau 76,95%;

- d. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Layanan Prasarana Internal berjumlah Rp 219.506.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp213.693.430 atau 97,35%;
 - e. Alokasi anggaran untuk Klasifikasi Rincian Output Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal berjumlah Rp 1.260.000, sampai dengan akhir Triwulan IV anggaran sudah terealisasi sebesar Rp 1.201.500 atau 95,36%.
2. Rincian realisasi keluaran (output) per Klasifikasi Rincian Output (KRO) adalah:
- a. Keluaran (output) dari KRO Layanan SDM sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 106,94% yang berasal dari realisasi Rincian Output Pembelajaran Digital, Gaji dan Tunjangan, Pengembangan SDM, serta Manajemen Pengetahuan;
 - b. Keluaran (output) dari KRO Layanan Umum sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00% yang berasal dari realisasi Rincian Output Operasionalisasi Kantor, Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran, dan Kerumahtanggaan;
 - c. Keluaran (output) dari KRO Layanan Sarana Internal sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00% yang berasal dari realisasi Rincian Output Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Peralatan Fasilitas dan Perkantoran, dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi;
 - d. Keluaran (output) dari KRO Layanan Prasarana Internal sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00% yang berasal dari realisasi Rincian Output Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - e. Keluaran (output) dari KRO Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal sampai dengan akhir Triwulan IV tahun 2021 telah terealisasi sebesar 100,00% yang berasal dari realisasi Rincian Output Laporan Kinerja Unit dan Laporan Keuangan Unit.
3. Hingga 31 Desember 2021, keseluruhan IKU dari total 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah memenuhi target akhir tahun 2021, namun masih terdapat IKU yang memiliki kendala dan tantangan dalam pencapaiannya pada Tahun 2021 yaitu IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Identifikasi isu utama, akar masalah, rencana tindakan, dan aksi berkaitan dengan capaian IKU tersebut adalah sebagai berikut :

a. Isu Utama

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak triwulan I 2020 berdampak pada pelaksanaan kegiatan (operasional maupun non operasional) pada unit-unit di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), termasuk Balai Diklat Keuangan Manado di dalamnya. Pelatihan klasikal yang pada awal tahun masuk dalam kalender pelatihan, sebagian mengalami perubahan metode pelaksanaan menjadi pelatihan digital, dan sebagian lagi dibatalkan pelaksanaannya. Walaupun disadari, pelaksanaan pelatihan dengan metode digital sejalan dengan pencapaian strategi Corporate University yang dilaksanakan oleh BPPK. Sampai dengan bulan November TA 2021, Balai Diklat Keuangan Manado melaksanakan kegiatan pelatihan dengan metode digital, yaitu pelatihan jarak jauh (PJJ)/distance learning.

b. Akar Masalah

Pelaksanaan kegiatan pelatihan dengan metode digital (PJJ) dan Pelatihan Dasar CPNS dengan metode distance learning dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu di Balai Diklat Keuangan Manado pada periode Januari s.d. November TA 2021 membawa pengaruh terhadap pencapaian target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA), khususnya pada indikator Penyerapan Anggaran. Kegiatan pelatihan dengan metode klasikal, yang sebelum terjadinya pandemi Covid-19 merupakan kegiatan yang menyerap anggaran belanja barang yang cukup signifikan, padahal di awal tahun sudah teralokasi anggarannya dalam DIPA Balai Diklat Keuangan Manado, berdasarkan Kalender Pelatihan Balai Diklat Keuangan Manado TA 2021 dinyatakan dibatalkan. Selain faktor sulitnya Balai Diklat Keuangan Manado mencari alternatif kegiatan untuk mendukung penyerapan anggaran yang tinggi pada triwulan I dan II, indikator Penyerapan Anggaran pada perhitungan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) memiliki bobot unsur yang tinggi, yaitu 15%.

Pada tanggal 26 Juli 2021, Balai Diklat Keuangan Manado atas persetujuan Kepala BPPK dan pengesahan Direktur Jenderal Anggaran (DJA Kemenkeu) merevisi anggarannya dengan mengalihkan sebagian anggaran pelatihan menjadi belanja modal sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Namun, dikarenakan beberapa paket pengadaan barang dan jasa (PBJ) dengan nilai yang relatif besar harus dipenuhi dari luar daerah (pulau Jawa), maka pembayarannya yang semula

dijadwalkan terealisasi pada bulan September dan Oktober tertunda pada bulan November. Hal ini berdampak pada tidak maksimalnya capaian nilai indikator Penyerapan Anggaran triwulan III dan indikator Deviasi Halaman III DIPA bulan Oktober.

Secara keseluruhan, Balai Diklat Keuangan Manado sudah memenuhi target IKU PKPA pada triwulan IV, di mana target IKU PKPA adalah sebesar 95,5 dan realisasinya sebesar 97,17, atau dengan capaian sebesar 101,75%.

c. Rencana Tindakan

- 1).Menjaga pelaksanaan belanja pada tahun anggaran selanjutnya (TA 2022) tetap berorientasi pada capaian output dan outcome, tidak hanya pada penyerapan anggaran;
- 2).Menjaga agar tiap-tiap indikator penilaian IKU PKPA dapat tercapai pada tahun anggaran selanjutnya.

d. Aksi

- 1).Melakukan rapat koordinasi internal untuk menentukan strategi-strategi pencapaian IKU PKPA setiap bulan;
- 2).Melakukan pemutakhiran data berkala terhadap kertas kerja penghitungan realisasi belanja sebagai alat pemantauan target-target belanja.

4. Sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2021, Balai Diklat Keuangan Manado telah melaksanakan 13 pelatihan dan satu ujian sertifikasi yang telah berakhir dari rencana 13 pelatihan dan satu ujian sertifikasi. Realisasi keluaran (output) dari pelatihan (Pembelajaran Digital) yang telah dilaksanakan yaitu sejumlah 53.346 jamlator dari rencana 49.882 jamlator.

B. SARAN

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2021 ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai fungsi tugas BDK Manado, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Untuk menjaga kinerja Balai Diklat Keuangan Manado yang sudah cukup baik dan untuk meningkatkan kinerja BDK Manado maka diperlukan :

1. Terus melakukan monitoring pelaksanaan anggaran dan melaksanakan rencana aksi yang telah dibuat agar capaian IKU “Persentase kualitas pelaksanaan anggaran” pada tahun depan dapat lebih baik tiap triwulannya;

2. Setiap pegawai melakukan pekerjaan sesuai tugas serta fungsinya masing-masing dan berkoordinasi satu dengan yang lain meskipun bekerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH) dan tetap mempertahankan protokol kesehatan selama pandemi masih berlangsung;
3. Tetap mempertahankan kinerja IKU yang telah mencapai target di tahun anggaran 2022;
4. Untuk mendukung pelatihan/*open class* jarak jauh yang akan dilakukan, perlu adanya dukungan teknis yang mendukung baik secara *software* maupun *hardware*;
5. Melakukan monitoring dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan.

LAMPIRAN I

KONTRAK KINERJA KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO TAHUN 2021



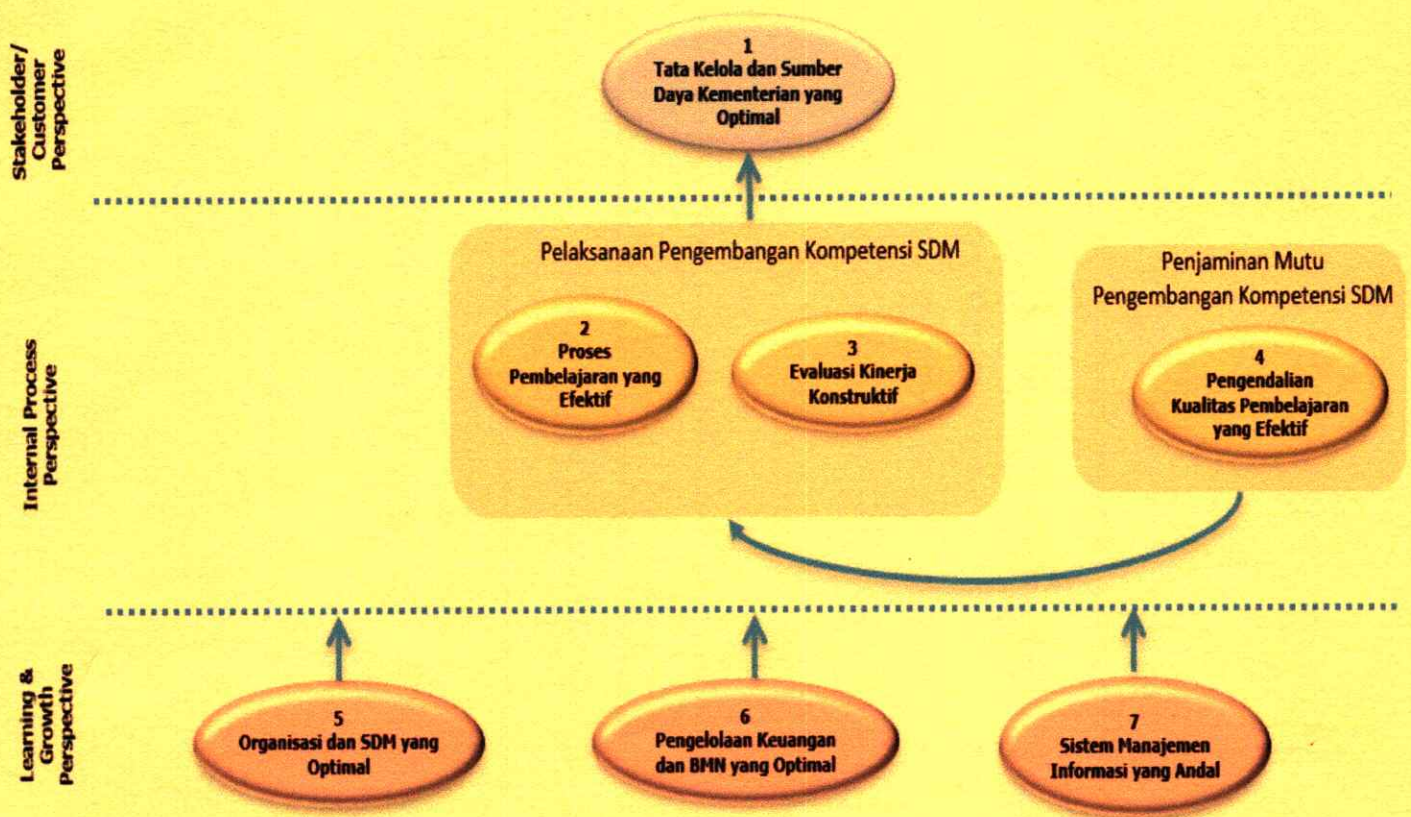
KONTRAK KINERJA
NOMOR: 19/PP/2021
KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Manado, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal	1a-CP Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%
		1b-CP Indeks kepuasan pengguna layanan	4,41 (skala 5)
2.	Proses pembelajaran yang efektif	2a-N Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran	4,33 (skala 5)
3.	Evaluasi kinerja konstruktif	3a-N Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti	100%
4.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif	4a-CP Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	5 (skala 5)
5.	Organisasi dan SDM yang optimal	5a-CP Indeks integritas	90,10 (skala 100)
		5b-N Persentase pelaksanaan kajian, <i>knowledge capture</i> , dan aktualisasi pembelajaran	100%
		5c-N Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	85%
		5d-N Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90 (skala 100)
		5e-N Persentase implementasi inovasi	100%
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	6a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%
		6b-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%
7.	Sistem manajemen informasi yang andal	7a-N Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen - BDK Manado
2. Pengelolaan Organisasi dan SDM - BDK Manado

Anggaran

Rp. 1.961.415.000,00

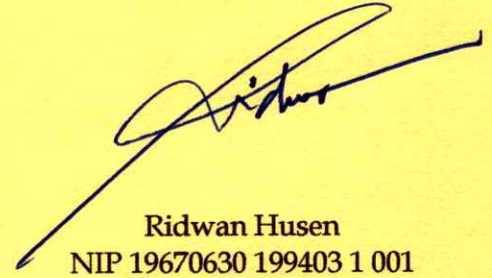
Rp. 2.912.710.000,00

Rp. 4.874.125.000,00

Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan,

Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

Manado, 29 Januari 2021
Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan
Manado,



Ridwan Husen
NIP 19670630 199403 1 001

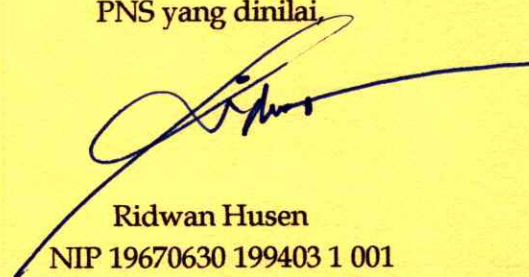
**RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
KEPALA BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal							
1a-CP	Persentase lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik	93%	93%	93%	93%	93%	93%	93%
1b-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	-	-	-	-	-	4,41	4,41 (skala 5)
2.	Proses pembelajaran yang efektif							
2a-N	Indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33 (skala 5)
3.	Evaluasi kinerja konstruktif							
3a-N	Persentase penyelesaian rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pengendalian kualitas pembelajaran yang efektif							
4a-CP	Indeks pemenuhan standar kualitas pembelajaran	-	5	5	-	5	5	5 (skala 5)
5.	Organisasi dan SDM yang optimal							
5a-CP	Indeks integritas	-	-	-	-	-	90,10	90,10 (skala 100)
5b-N	Persentase pelaksanaan kajian, <i>knowledge capture</i> , dan aktualisasi pembelajaran	10%	25%	25%	70%	70%	100%	100%
5c-N	Persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP	-	-	-	-	-	85%	85%

No.	IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5d-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	90	90	90	90	90	90	90 (skala 100)
5e-N	Persentase implementasi inovasi	30%	50%	50%	-	50%	100%	100%
6.	Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
6a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
6b-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	-	-	-	-	-	100%	100%
7.	Sistem manajemen informasi yang andal							
7a-N	Persentase pemenuhan basis data aplikasi Semantik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Manado, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Ridwan Husen

NIP 19670630 199403 1 001

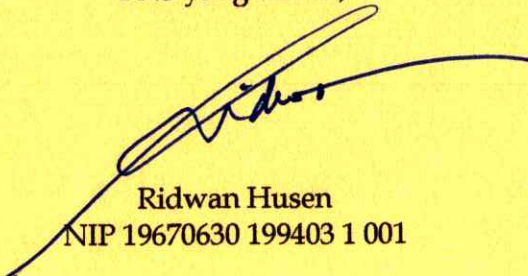
**INISIATIF STRATEGIS
BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2021**

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal / Indeks kepuasan pengguna layanan	Pelaksanaan <i>open class</i> / <i>webinar</i> (sesuai permohonan dari Eselon I Kemenkeu) secara daring	Peserta berjumlah 200 orang atau 50 orang untuk tiap pelaksanaan <i>open class</i>	Q1 : Pelaksanaan <i>open class</i> 1	Q1 : Laporan <i>open class</i> 1	Januari - Desember	• Seksi Penyelenggaraan • Seksi Evaluasi dan Informasi • Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	-
				Q2 : Pelaksanaan <i>open class</i> 2	Q2 : Laporan <i>open class</i> 2			
				Q3 : Pelaksanaan <i>open class</i> 3	Q3 : Laporan <i>open class</i> 3			
				Q4 : Pelaksanaan <i>open class</i> 4	Q4 : Laporan <i>open class</i> 4			

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
2.	Tata kelola dan sumber daya Kementerian yang optimal / Indeks kepuasan pengguna layanan	Workshop melalui <i>capacity building</i> Pegawai BDK Manado	Total peserta adalah 16 orang (Jumlah PNS di BDK Manado)	Q2 : <i>Workshop pengenalan peralatan studio / teknologi pembelajaran</i>	Q2 : 16 peserta	April - Juni	Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal	-
				Q2 : <i>Workshop teknik lighting untuk ruangan studio/streaming</i>	Q2 : 16 peserta			
				Q2 : <i>Workshop tutorial penggunaan streaming software (visual + audio)</i>	Q2 : 16 peserta			

Manado, 29 Januari 2021

PNS yang dinilai,



Ridwan Husen
NIP 19670630 199403 1 001

Sasaran Kerja Pegawai

No	I. PEJABAT PENILAI		No	II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI	
1	Nama	Rionald Silaban	1	Nama	Ridwan Husen
2	NIP	19660423 199010 1 001	2	NIP	19670630 199403 1 001
3	Pangkat/ Gol. Ruang	IV/e/Pembina Utama	3	Pangkat/ Gol. Ruang	Penata Tingkat I / IIId
4	Jabatan	Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	4	Jabatan	Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan Manado
5	Unit Kerja	Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan	5	Unit Kerja	Balai Diklat Keuangan Manado

No	III. KEGIATAN TUGAS POKOK JABATAN	AK	TARGET			
			KUANTITAS/ OUTPUT	KUALITAS/ MUTU	WAKTU	BIAYA
1.	Menghasilkan lulusan pendidikan dan pelatihan dengan predikat minimal baik		93%	100	12	-
2.	Meningkatkan kepuasan pengguna layanan		4,41 (skala 5)	100	12	-
3.	Mendapatkan indeks persepsi peserta pelatihan terhadap proses pembelajaran		4,33 (skala 5)	100	12	-
4.	Menyelesaikan rekomendasi pelatihan yang ditindaklanjuti		100%	100	12	-
5.	Memenuhi Standar kualitas pembelajaran		5 (skala 5)	100	12	-
6.	Mewujudkan organisasi yang berintegritas tinggi		90,10 (skala 100)	100	12	-
7.	Melaksanakan kajian, <i>knowledge capture</i> , dan aktualisasi pembelajaran		100	100	12	-
8.	Memenuhi persentase penugasan pelatihan yang sesuai dengan AKP		85%	100	12	-
9.	Melaksanakan FGD Pejabat Administrator yang efektif		90 (skala 100)	100	12	-
10.	Mengimplementasikan inovasi		100%	100	12	-
11.	Meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran		95,5%	100	12	Rp.4,874 M
12.	Memenuhi persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan		100%	100	12	-
13.	Memenuhi kelengkapan basis data aplikasi Semantik		100%	100	12	-

Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan,

Rionald Silaban
NIP 19660423 199010 1 001

Manado, 29 Januari 2021
Plt. Kepala Balai Diklat Keuangan
Manado

Ridwan Husen
NIP 19670630 199403 1 001

LAMPIRAN II

REALISASI DIKLAT BDK MANADO TRIWULAN IV TAHUN 2021

REALISASI PELATIHAN BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Program	Pemilik Program	RENCANA																													
			Waktu Penyelenggaraan						Unit Asal Calon Peserta																							
			Mandiri		Klasikal (Tatap Muka)		Action Learning		SE	DE	N	DJA	DJP	DJBC	DJPB	DJKN	DJPK	DJPP	R	ITJEN	BKF	BPPK	K/L	Jumlah Peserta	Pembiayaan	Lokasi Penyelenggaraan	Fasilitas Penyelenggaraan	Lama Hari (Kalender)	Jamlat	Jumlah Peserta		Jamlator
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai																								Kemenkeu	Non Kemenkeu	
1	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan I	Pusdiklat Pajak			1-Feb	9-Feb						28												28	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	7	76	28		2128
2	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Penyuluh Pajak Dasar Angkatan II	Pusdiklat Pajak			15-Feb	23-Feb						30												30	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	7	76	30		2280
3	Pelatihan Jarak Jauh Sistem Informasi Geografis	Pusdiklat Pajak			12-Apr	14-Apr	15-Apr	27-Aug				33												33	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	33	58	33		1914
4	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan II	Pusdiklat PSDM	25-Mei	2-Juli	5-Juli	8-Okt	26-Ags	1-Okt					10	30									40	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	100	405	40		16200	
5	Pelatihan Jarak Jauh Pengadaan barang/Jasa Pemerintah	Pusdiklat AP			7-Juni	10-Juni						35											35	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	4	40	35		1400	
6	Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LKPP			17-Juni	18-Juni						35											35	BDK Manado	BDK Manado		2	0	35		0	
7	Pelatihan Jarak Jauh Jurusita Pajak	Pusdiklat Pajak			14-Juni	23-Juni						41											41	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	8	66	41		2706	
8	Pelatihan Jarak Jauh Bendahara Pengeluaran	Pusdiklat AP			28-Juni	5-Juli						35											35	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	6	44	35		1540	
9	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen SKPP	Pusdiklat AP			5-Juli	9-Juli						49											49	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	5	42	49		2058	
10	Pelatihan Dasar CPNS (Distance Learning Dalam Keadaan Darurat atau Keadaan Tertentu) Angkatan III	Pusdiklat PSDM	19-Juli	25-Ags	26-Ags	26-Nov	14-Okt	20-Nov															40	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	100	405	40		16200	
11	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan I	Pusdiklat Pajak			2-Ags	13-Ags						30											30	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	9	69	30		2070	
12	Pelatihan Jarak Jauh Fungsional Asisten Penyuluh Pajak Angkatan II	Pusdiklat Pajak			23-Ags	2-Sep						30											30	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	9	69	30		2070	
13	Pelatihan Jarak Jauh Penguasaan Wilayah Dengan Optimalisasi Media Internet	Pusdiklat Pajak			27-Sep	1-Oct	4-Oct	15-Nov				33											33	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	35	65	33		2145	
14	Pelatihan Jarak Jauh Dasar-Dasar Metodologi Penelitian dan Pengolahan Data	Pusdiklat KU			14-Oct	28-Oct								25									25	BDK Manado	BDK Manado	PJJ	10	96	25		2400	
									0	0	379	10	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459	Total					459	0	55111	
Jumlah Jamlator Non Latsar																												22711				

REALISASI PELATIHAN BALAI DIKLAT KEUANGAN MANADO TAHUN ANGGARAN 2021

No	Nama Program	Pemilik Program	Waktu Penyelenggaraan						REALISASI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
			Mandiri			Klasikal (Tatap Muka)			Action Learning			Unit Asal Peserta												Jumlah Peserta	Pembiayaan	Lokasi Penyelenggaraan	Fasilitas Penyelenggaraan	Lama Hari (Kalender)	Jamlat	Jumlah Peserta		Jamlator																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Manado, 1 Desember 2021
Kepala Balai,



Ditandatangani secara elektronik
Cucu Pujasetia

